

**ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN DAERAH DI KABUPATEN  
SIMEULUE**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**AULIA RAHMAD**  
**NIM. 160801039**

**Mahasiswa Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
Prodi Ilmu Politik**

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2023 M /1444 H**

**“ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN DAERAH DI  
KABUPATEN SIMEULUE “**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi  
Pada Program Studi Ilmu Politik**

Oleh :

**AULIA RAHMAD**

**NIM. 160801039**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Politik**

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

**Pembimbing 1**



**Dr. Ernita Dewi, S.Ag. M.Hum  
NIP.197307232000032002**

**Pembimbing II**



**Ramzi Murzidin, S.H.I., M.A  
NIP.198605132019031006**

**A R - R A N I R Y**

**LEMBAR PENGESAHAN SIDANG**

**ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN DAERAH DI KABUPATEN SIMEULUE  
SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (SI) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 21 Juli 2023 M  
3 Muharram 1445 H

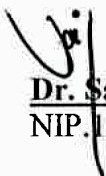
Banda Aceh,  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,



Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum  
NIP. 197307232000032002

Penguji I



Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si  
NIP. 196110051982031007

Sekretaris,



Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A  
NIP. 198605132019031006

Penguji II



Arif Akbar, M.A  
NIP. 199110242022031001

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Dr. Muji Mulia S.Ag, M.Ag  
NIP. 197403271999031005

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Rahmad  
NIM : 160801039  
Prodi : Ilmu Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R A N I R Y Banda Aceh, 21 Juli 2023

Yang Menyatakan,

  
DFAKX688929890

Aulia Rahmad

## ABSTRAK

Nama : Aulia Rahmad  
NIM : 160801039  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan / Ilmu Politik  
Judul : Analisis Dampak Pemekaran Daerah di Kabupaten Simeulue  
Pembimbing I : Dr. Ernita Dewi, S.Ag. M.Hum  
Pembimbing II : Ramzi Murziqin, S.HI, M.A

Pemekaran daerah merupakan proses pembentukan wilayah administratif baru dari wilayah yang sudah ada. Dampak dari pemekaran daerah sangat luas dan beragam, yang melibatkan beberapa aspek bidang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemekaran daerah terhadap bidang pelayanan publik atau sosial ekonomi. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran daerah memiliki dampak pada bidang pelayanan publik dan sosial ekonomi. Dampak pemekaran daerah juga dapat menghadirkan tantangan ekonomi dimana di Kabupaten Simeulue dari tahun 2018-2022. Pemekaran daerah juga dapat berdampak pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak pemekaran daerah di Kabupaten Simeulue secara menyeluruh di bidang pelayanan publik dan sosial ekonomi. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih baik dalam melaksanakan pemekaran daerah, dengan mempertimbangkan dampak yang berpotensi terjadi pada berbagai sektor.

**Kata Kunci : Analisis, Pemekaran Daerah, Pelayanan Publik, Sosial Ekonomi.**

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

## KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Allah subhanahuwata'alla, karena atas limpahan rahmat dan karunianya, peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Analisis Dampak Pemekaran Daerah Di Kabupaten Simeulue”. Skripsi ini penulis ajukan untuk mendapat gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh. Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan oleh Allah subhanahuwata'alla kepada baginda Rasulullah, Nabi Muhammad shalallahu'alaihi wasallam serta segenap keluarga dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Selama penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kendala serta hambatan. Namun, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan selesai. Jika tidak ada bantuan dari berbagai pihak. Peneliti menyadari ada begitu banyak kesalahan dan kekurangan didalam skripsi ini, sehingga peneliti sangat membutuhkan kritikan dan saran yang membangun, agar penulis bisa lebih baik lagi kedepannya. Akhir kata, semoga skripsi ini bermamfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti banyak mendapat bimbingan, dan arahan, petunjuk serta bantuan dari berbagai pihak. Sehingga, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang mendalam, kepada:

1. Bapak Dr. Muji Mulia, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-raniry Banda Aceh.

2. Ibuk Rizkika Lhena Darwin, M.A, selaku ketua jurusan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-raniry Banda Aceh.
3. Bapak Eka Januar, M.Soc.Sc, selaku dosen pembimbing akademik yang telah meberikan bimbingan dalam menyelsaikan studi di jurusan Ilmu Politik UIN Ar- Araniry Banda Aceh.
4. Ibuk Dr. Ernita Dewi, S.Sg. M.Hum, selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran umntuk membimbing dan memeberakan arahan di dalam skripsi ini.
5. Bapak Ramzi Murziqin, MA, selaku pembimbing II yang telah membantu dalam memberikan arahan serta masukkan kepada saya untuk bisa menyelesaikan skripsi saya.
6. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-raniry Banda Aceh.
7. Teristimewa sekali peneliti persembahkan kepada ayah tercinta Ahmadsyah dan Ibu tercinta Mardiani yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada saya sehingga pada titik ini saya bisa meneyelesaikan skripsi ini. Dan juga saya berterimakasih kepada kakak tercinta Dewi Nirmala, S.Pd yang selalu memberikan nasehat kepada saya. Terimakasih juga kepada keluarga-keluarga besar saya yang selalu mendukung saya untuk bisa menyelsaikan studi yang saya tempuh.
8. Terimakasih kepada abang Yonas Efendi, SH yang telah membantu saya dalam meneyelesaikan skripsi saya. Dan juga saya berterimakasih

kepada teman-teman yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu : T. hendra Mulyadi, Risdi Irawan, Natasya Ilmi,Alda Wati dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.



Banda Aceh, 5 juli 2023

Penulis,

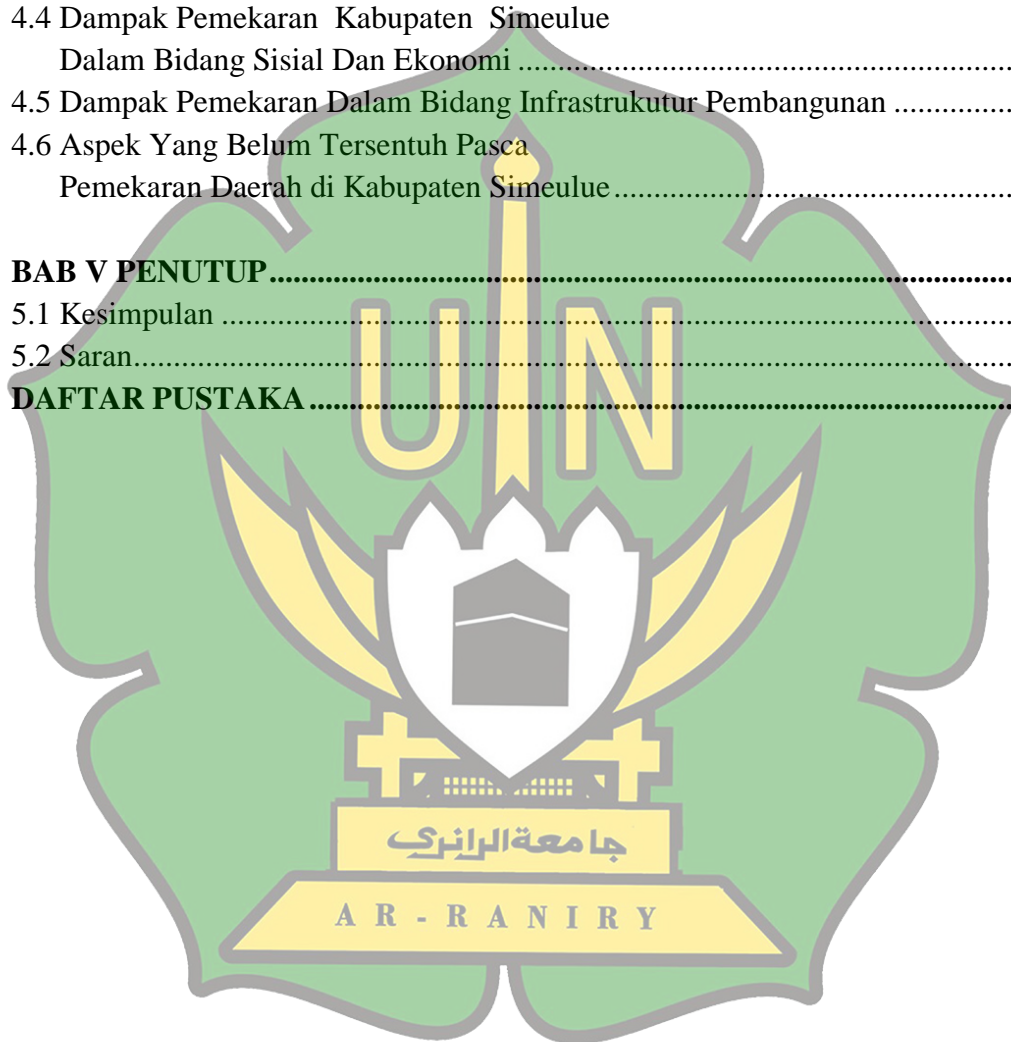
Aulia Rahmad



## DAFTAR ISI

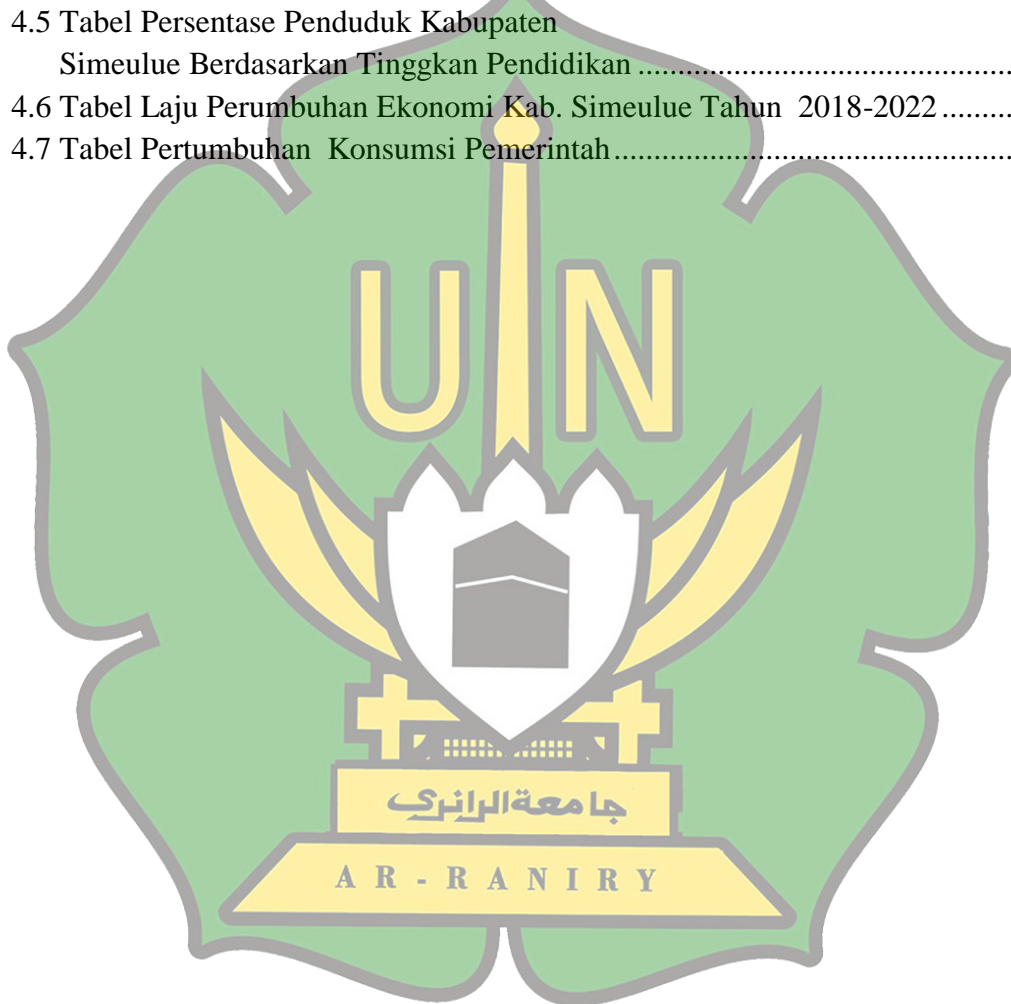
<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAA KARYA ILMIAH .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Mamfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Landasan Teori.....	10
1. Teori Otonomi Daerah.....	10
2. Teori Desentralisasi.....	13
3. Konsep Pemekaran.....	14
4. Teori Daerah.....	15
C. Keuntungan Pemekaran.....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>19</b>
1. Pendekatan Penelitian.....	19
2. Lokasi Penelitian.....	19
3. Fokus Penelitian.....	20
4. Informan Penelitian.....	20
5. Teknik Pengumpulan Data.....	21
6. Teknik Analisis Data.....	22
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>25</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	25
4.1.1 Profil Kabupaten Simeulue.....	25
4.1.2 Sejarah Kabupaten Simeulue.....	26
4.1.3 Mata Pencanharian Penduduk Kabupaten Simeulue.....	30

4.2	Visi-Misi Sekretariat Kabupaten Simeulue.....	30
4.2.1	Visi .....	31
4.2.2	Misi .....	32
4.3	Dampak Pemekaran Kabupaten Simeulue Dalam Bidang Playanan Publik .....	33
4.4	Dampak Pemekaran Kabupaten Simeulue Dalam Bidang Sisial Dan Ekonomi .....	41
4.5	Dampak Pemekaran Dalam Bidang Infrastruktur Pembangunan .....	45
4.6	Aspek Yang Belum Tersentuh Pasca Pemekaran Daerah di Kabupaten Simeulue .....	46
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>49</b>
5.1	Kesimpulan .....	49
5.2	Saran.....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>51</b>



## DAFTAR TABEL

4.1 Tabel Kecamatan Kabupaten Simeulue .....	6
4.2 Tabel Informan Penelitian.....	20
4.3 Data BPS Provinsi Aceh 2018 .....	38
4.4 Data Perbandingan Kabupaten Kota .....	39
4.5 Tabel Persentase Penduduk Kabupaten Simeulue Berdasarkan Tinggkan Pendidikan .....	40
4.6 Tabel Laju Perumbuhan Ekonomi Kab. Simeulue Tahun 2018-2022 .....	43
4.7 Tabel Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah .....	45



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu Negara berkembang yang saat ini terlihat jelas sedang melaksanakan pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan. Pembangunan dapat diartikan sebagai gagasan untuk mewujudkan sesuatu yang dicita-citakan. Di mana gagasan tersebut lahir dalam bentuk usaha untuk mengarahkan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan, serta pembangunan bangsa.<sup>1</sup>

Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional yang dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berhubungan dengan pemberian otonomi daerah yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat.<sup>2</sup>

Pemekaran Wilayah merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam rangka mempercepat pembangunan daerah dan mempermudah akses pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, diharapkan membuat daerah tersebut semakin mandiri sebagai daerah otonom.

Pemekaran dilihat menjadi sebuah langkah maju dan dan tepat untuk mempercepat pembangunan daerah dengan meningkatkan kualitas dan

---

<sup>1</sup> Saeful Anwar, *Pemekaran Wilayah Bine Selatan*, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar 2014), h.1

<sup>2</sup> Eko Oktah Supri Lariky, *Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Bangkinang Menurut Persperktif Ekonomi Islam*, (Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau Pekanbaru 2012) h.1

efektifitas dalam mengelola daerah tersebut sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lancar dan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan sebagaimana tujuan dari pemekan itu sendiri.

Pemekaran daerah dapat digunakan sebagai langkah besar untuk mengejar ketertinggalan. Daerah memiliki wewenang yang banyak dan mendapatkan perhatian lebih untuk memperbaiki dan mengejar ketertinggalannya dari daerah-daerah lain.<sup>3</sup>

Menurut Marnis, terdapat berbagai peran sekaligus tanggung jawab pemerintah dalam memajukan negara berkembang menjadi negara maju diantara peran tersebut bukan sekedar hanya mengukuhkan perekonomian namun sampai pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang semakin maju dan modrn. Selain perekonomian peran dalam memajukan peran pemerintah menjadi unggul maka akan dituntut dalam segala aspek yang berkelanjutan seperti infrastryktur yang berstandar dan memiliki fungsi mutu, mebuca lowongan kerja bagi masyarakat baik dari segi permodalan atau investasi yang mampu memberikan manfaat serta kuntungan bagi pemerintah. Hal tersebut dapat meningkatkan kelajuaan yang lebih efesien dalam menciptakan negera berkembang menjadi negara maju.<sup>4</sup>

Laju peningkatan pengangguran dan kemiskinan terus merambat setiap tahun hingga sekarang namun tingkat untuk mengurangi hal tersebut sangat kurang dan perlu dijadikan hal utama oleh pemerintah dalam strategi mejadikan negara maju. Berdasarkan perihal tersebut menjadi pertanyaan sendiri kepada pemerintah apakah dengan mengubah strategi melalui perekonomian yang bersifat ekonomi industrialisasi (kapitalis) atau dengan melalui perekonomian pertanian (karakyatan). Prinsip tersebut mengacu pada ekonomi suatu wilayah akan stabil dan meningkat jika perekonomian sendiri dilakukan oleh warga dengan sebanyak-banyaknya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Ermaya Suradinata, *pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka untuk meningkatkan interrasi bangsa*, (Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional, Departemen Pertahanan, 2000), hal 10.

<sup>4</sup> *Ibid* Saeful Anwar

<sup>5</sup> Meilia Lovita, *Dampak Pemekaran Kabupaten Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Lampung Barat*, (Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung), h. 1-2

Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang Dasar 1945 memiliki makna bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan kebebasan dalam menjalankan otonomi daerah. Namun otonomi daerah selalu bernaung pada prinsip-prinsip dasar masyarakat Indonesia sendiri diantaranya demokrasi, gotong royong, kesetaraan, berkeadilan serta mencermati potensi dalam keberagaman daerah antara lain luas daerah, batas wilayah yang menyuplai sumber daya alam, akomodasi umum masyarakat, hingga jumlah penduduk. Selain hal tersebut hal yang perlu di evaluasi dalam program otonomi daerah yakni pemekaran suatu wilayah<sup>6</sup>

Salah satu usaha dari pemerintah baik pusat maupun daerah dalam mengembangkan serta meningkatkan kemajuan dalam sektor apapun perlu diperhatikan ialah pemekaran wilayah. Hal tersebut menjadi sangat penting karena dapat membuahakan pemerintah yang efektif dan efisien dalam menanggulangi daerah berkembang menjadi daerah maju. Manfaat Lansung yang dapat dirasakan masyarakat dari pemekaran wilayah yaitu terwujudnya pembangunan hal tersebut dapat diwujudkan pada saat pengembangan otonomi tepatnya masa transisi sehingga masyarakat akan melahirkan kekuatan sampai intervensi dari luar luar akan menipis. Sehingga lambat laun masyarakat la yang lebih berkemajuan dalam wilayahnya sendiri.<sup>7</sup>

Dasar otonomi daerah pada dasarnya mempunyai makna bahwa terdapat kewenangan daerah dalam upaya pengendalian administratif maupun politik. Maka dari itu, suatu negara sangat dituntut untuk berdiri sendiri dalam segala bidang walaupun masih ada beberapa unsur yang dikaitkan dengan dunia luar serta segala proses dan tanggung jawabnya melibatkan pemerintah pusat. Suatu daerah bagian negara jika tidak mengalami kemajuan maka akan selalu berpacu pada pemerintah pusat yang dapat menghambat kemajuan berbagai unsur di daerah tersebut. Berdasarkan praturan pemerintahan indonesia yang

---

<sup>6</sup> Siswanto Sunamo, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) h.13

<sup>7</sup> Yusnani Hasyimzoem, dkk, *Hukum Daerah*, (Malang CV. Cita Intrans Selaras Wisma Kalimetro,2016) h. vii

terkadung pada undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menjelaskan dengan rinci tentang daerah Indonesia akan dipecah ke bagian-bagian yang lebih kecil dengan difasilitasi oleh pemerintah dalam perkembangannya. Sehingga dengan adanya pembagian daerah yang otonom maka daerah tersebut akan dituntut segala bidang baik bidang perekonomian, pembangunan fasilitas umum, pelayanan publik dan bidang-bidang lainnya yang memberikan dampak kepada Negara Indonesia merosot disegi apapun di manca negara dan akan terhindar dari daerah yang tinggal ditempat tanpa ada kemajuan. Salah satu dampak dari hal ini adalah banyaknya daerah yang ingin melakukan pemekaran daerahnya yang lebih spesifiknya adalah pemekaran daerah di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh.<sup>8</sup>

Berdasarkan undang-undang pasal 32 ayat (1) Nomor 23 Tahun 2014 menyangkut Pemerintah daerahnya tentang pemekaran wilayah bahwasanya pemekaran wilayah berbentuk pemisahan wilayah provinsi hingga kabupaten atau kota membentuk dua ataupun lebih wilayah baru. Selain makna tersebut pemekaran wilayah juga terkait sebagai penggabungan beberapa wilayah yang berdekatan dalam wilayah provinsi menjadi wilayah sendiri yang baru. Selanjutnya undang-undang pasal 32 ayat 2 terkait pemisahan wilayah dibentuk dengan berbagai kesiapan dan prosesnya sendiri serta harus memenuhi syarat-syarat dasar hingga syarat administratif.

Berdasarkan manfaat dari pemekaran wilayah dapat diketahui dari tujuan utama dari suatu pemekaran wilayah yaitu:<sup>9</sup>

1. Memakmurkan masyarakat dengan alternatif peningkatan efisiensi dan efektivitas
2. Penanganan Pemerintah serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat

<sup>8</sup> Andi Rakasiwi, Dampak Pemekaran Terhadap Pembangunan Daerah Di Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2010-2012, *Jom Fisip*, Vol.1 No.2 (Oktober 2014), h. 1-2

<sup>9</sup> Moehammad Riswan Roesli, *Simeulue Dari Masa Ke Masa*, hal- 13

Pemekaran daerah dijadikan sebagai langkah dalam meningkatkan laju pembangunan dengan alternatif pengembangan secara bertahap terkait kualitas dan keterbukaan informasi serta pelayanan kepada masyarakat. Selain itu Pemekaran wilayah menjadi bagian dari kewajiban dan tolak ukurnya kinerja pemerintah daerah setempat sebagai evaluasi kendali rentang pemerintah yang terkait keberhasilan produktivitas kerja dalam pembangunan daerah yang di embannya.<sup>10</sup>

Secara geografis Pulau Simeulue beserta pulau-pulau besar dan kecil disekitarnya terletak di wilayah pantai barat Provinsi Aceh. persisnya berjarak sekitar 105 mil laut dari Meulaboh Kabupaten Aceh Barat dan berada pada posisi astronomi antara 02°15'13"- 02°55'04" Lintang Utara dan 95°40'15"- 96°30'45" Bujur Timur.

Dengan posisi tersebut dapat dikatakan bahwa Kabupaten Simeulue merupakan gugus kepulauan terdepan dan terluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang langsung berbatasan dengan perairan internasional dan dikelilingi oleh Samudera Hindia.<sup>11</sup>

Jumlah penduduk Simeulue berdasarkan hasil sensus 2013 berkisar 91.000 jiwa. Oleh karena itu laju pertumbuhan penduduk semakin meningkat hal tersebut akan berdampak pada persaingan yang akan dihadapi dan ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue. Tingkat pesatnya jumlah penduduk tiap tahun jika dibina dengan baik akan melahirkan sumber daya manusia yang akan dijadikan aset pemerintahan untuk menjalankan pembangunan selajutnya. Sehingga dengan hal tersebut maka pemerinytah tidak akan mencari atau bernegosiasi dengan orang laur sebagai upaya dalam pembangunan daerah kewenangannya maka masyarakat pribumilah yang bertindak dalam menjalankan estafet pemerintahan. Pembangunan Simeulue sangat penting bagi ketahanan sosial ekonomi dan pertahanan keamanan karena daerah tersebut terletak pada wilaya yang berbatasan langsung dengan

---

<sup>10</sup> Moehammad Riswan Roesli, *Simeulue Dari Masa Ke Masa*, hal- 13

<sup>11</sup> Moehammad Riswan Roesli, *Simeulue Dari Masa Ke Masa*, hal- 13



perairan laut internasional. Setelah kabupaten simeulue memisahkan diri dari aceh barat tahun 1999 menjadi kabupaten definitif , sebelumnya kabupaten simeulue memiliki lima Kecamatan. Namun seiring berjalannya waktu, kini Kabupaten Simeulue sudah memiliki sepuluh Kecamatan dan 138 Desa.

<b>Jumlah Kecamatan Kabupaten Simeulue Tahun 1999</b>	<b>Jumlah Kecamatan Kabupaten Simeulue Tahun 2023</b>
1. Kec. Simeulue Timur	1. Kec. Simeulue Timur
2. Kec. Simeulue Barat	2. Kec. Simeulue Barat
3. Kec. Simeulue Tengah	3. Kec. Simeulue Tengah
4. Kec. Teupah Barat	4. Kec. Teupah Barat
5. Kec. Salang	5. Kec. Salang
	6. Kec. Teupah Selatan
	7. Kec. Teluk Dalam
	8. Kec. Simeulue Cut
	9. Kec. Teupah Tengah
	10. Kec. Alafan

Setelah pemekaran begitu banyak dampak yang terlihat baik itu di segi kebijakan publik, infrastruktur pembangunan dan kemajuan ekonomi masyarakat yang ada di kabupaten simeulue, semua itu tentunya tidak luput dari dampak pemekaran yang terjadi.

Menyandang daerah yang terisolir, tentu dapat menjadi ancaman tersendiri bagi Kabupaten Simeulue baik dari luar maupun dalam negeri jika pemekaran daerah tidak direalisasikan. Oleh sebab itu, Simeulue sangat berterima kasih sekali karena telah dilakukan pula pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat menjadi sebuah Kabupaten Simeulue. Bahkan wacananya Simeulue sedang diusulkan pula pemekaran daerah menjadi dua Kabupaten yaitu Selaut Besar dan masih menunggu direalisasikan oleh pemerintah pusat. Masyarakat pun berharap agar keinginan tersebut dapat terkabul sebagaimana mestinya.

Berkaitan dengan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menulis proposal penelitian dengan judul “**Analisis Dampak Pemekaran Daerah Di Kabupaten Simeulue**”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dikemukakan rumusan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana dampak pemekaran daerah Kabupaten Simeulue dalam bidang pelayanan publik?
2. Apakah dampak pemekaran Daerah Kabupaten Simeulue dalam bidang sosial ekonomi?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Dengan bertitik tolak pada perumusan masalah sebagaimana yang diuraikan di atas maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang beberapa hal sebagai berikut:

1. Memahami dampak pemekaran daerah Kabupaten Simeulue dalam bidang pelayanan publik?
2. Memahami dampak pemekaran daerah Kabupaten Simeulue dalam bidang sosial ekonomi?
3. Memahami nilai lebih yang belum tersentuh pasca pemekaran daerah di Simeulue?

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat teoritis**

Untuk memperoleh khasanah ilmu pengetahuan penulis di bidang ilmu sosial dan politik pada umumnya dan ilmu politik pada khususnya bagi perkembangan ilmu politik mengenai dampak pemekaran daerah di Kabupaten Simeulue dalam upaya mengelola tantangan dan peluang pemekaran daerah, menjadi pedoman bagi para pihak untuk mendalami dampak pemekaran daerah serta memberikan sumbangan keilmuan/kajian mengenai prosedur otonomi pemekaran Kabupaten Simeulue.

Selanjutnya penelitian ini berharap dapat dijadikan sebagai acuan dalam memberikan kebijakan tentang pembangunan Daerah Otonomi baru yang berdampak pada kemajuan pembangunan, pelayan umum, serta dalam kehidupan masyarakat yang dilandaskan kesejahteraan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Dalam Penelitian ini ada beberapa kutipan referensi terdahulu yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian tentang ini sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh para penulis dan peneliti sebagai berikut :

Muh. Askar Sattara, Dengan Judul Penelitian “Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Desa Barugae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang” Kesimpulan Peneliannya adalah : Penyelenggaraan pelayanan Publik setelah lebih responsif atas kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan partisipatif. Masyarakat mengharapkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik setelah Desa Barugae mekar antara lain semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam wujud pelayanan yang cepat, mudah, berkeadilan, berkepastian hukum, transparan, aman, tepat, biaya yang wajar, dan dapat di pertanggung jawabkan.

Dalam hal pelayanan pengurusan di Kantor Desa Barugae, masyarakat menginginkan pelayanan yang benar-benar berkualitas. Dan Pemerintahan Desa Barugae sudah berusaha dengan baik dalam kualitas pelayanan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari hasil laporan pada informan dalam wawancara.

Kualitas pelayanan sudah dikatakan baik bisa dilihat dari aspek Profesionalisme yang meliputi kemampuan pegawai dalam mempergunakan peralatan, aspek mentaati segala peraturan yang melandasi bidang pekerjaan, aspek Kejelasan yang meliputi prosedur pelayanan yang

baik serta rincian biaya atau tarif pengurusan yang tidak mahal dan bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat di Desa Barugae<sup>12</sup>

Rika Oyadila, dengan judul penelitiannya “Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita Di Kabupaten Bener Meriah” Hasil Penelitiannya adalah : Pertama, Berdasarkan Uji Paired diperoleh nilai sig. (2-tailed) sebesar  $0.469 > 0.05$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara pendapatan per kapita Kabupaten Bener Meriah sebelum dan sesudah pemekaran.

Kedua, Hasil uji hipotesis pertumbuhan pendapatan per kapita sesudah pemekaran lebih kecil yakni rata-rata 3,80 persen selama periode 1990-2003 menjadi 2,00 persen selama periode 2005-2018. Dengan demikian dapat dikatakan Kabupaten Bener Meriah mengalami Penurunan pendapatan Per Kapita setelah di laksanakan pemekaran wilayah.

Ketiga, Rata-rata tingkat pengeluaran pemerintah lebih tinggi sebelum terlaksananya pemekaran sebesar 28,99 persen selama periode 1990-2003 dan menurun sebesar 6,24 persen selama periode 2005-2018, menyebabkan penurunan pertumbuhan PDRB sesudah pemekaran.<sup>13</sup>

## 2.2 Landasan Teori

### 1. Teori otonomi Daerah

Secara garis besar pengertian otonomi daerah berasal dari Yunani dimana autos: sendiri, dan nomos: peraturan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dijadikan secara harfiah bahwasanya otonomi peraturan

<sup>12</sup> Muh. Askar Sattara.2016. *Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Desa Barugae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang*.Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Makassar. Hal. 61-62

<sup>13</sup> Rika Oyadila. 2020. *Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita Di Kabupaten Bener Meriah*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh. Hal 81-82

sendiri atau undang-undang sendiri dan dilanjutkan menjadi wilayah pemerintahan sendiri.<sup>14</sup>

Otonomi wilayah merupakan wilayah yang memiliki hak kewajiban di dalam kawasan wilayah yang dimilikinya serta berhak dan tanggung jawab dalam menjalankan aspirasi masyarakat yang berlandaskan undang-undang. Sedikit berbeda dengan daerah otonomi yaitu kesatuan masyarakat hukum namun wilayah nya terbatas wilayah tertentu namun berkewajiban mengayomi masyarakat melalui aspirasi masyarakat dan berlandung Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>15</sup>

Undang-undangan Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa otonomi daerah yaitu segala bentuk tindakan dan tanggung jawab dalam menjalankan urusan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah setempat baik meningkatkan kemajuan maupun hanya dalam menstabilkan perekonomian daerah itu sendiri yang dalam pada hal itu masih naungan NKRI. Sebagai penjelasan lebih dalam maka akan dijabarkan bahwasanya pengertian kekuasaan disini yaitu kewenangan kekuasaan pemerintah dipegang oleh Presiden namun untuk menjalankan pelaksanaannya dilakukan kementerian yang telah dipilih oleh Presiden guna untuk mengontrol serta mengoptimalkan kinerja yang menjadikan aspirasi masyarakat terwujudkan seperti mensejahterakan, perlindungan, dan pelayanan masyarakat itu sendiri.

Arti dari otonomi secara sempit bahwa otonomi bisa analisis dengan kemandirian. Namun dari arti yang lebih luas otomi diartikan sebagai suatu wilayah yang memiliki kemampuan untuk berkembang dengan sendirinya dan mempunyai kemampuan untuk menunjang keberhasilan dalam wilayah tersebut baik dari segi perekonomian,

<sup>14</sup> Ny. Arie Sukanti Hutagalung, Markus Gunawan, *Kewanangan Pemerintahan Di Bidang Pertahanan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), h.99

<sup>15</sup> HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), h.76

pembangunan, fasilitas dan pelayanan masyarakat. Dengan demikian otonomi dijadikan sebagai kemandirian suatu wilayah yang erat kaitannya dengan produk serta tanggung jawab terkait urusan pemerintahannya sendiri.<sup>16</sup>

Otonomi daerah menjadi pusat perhatian pemerintah Indonesia terhadap kemajuan produktivitas kerja kementerian yang ditugaskan serta mandi standar kebersihan dari segala program yang dijalankan atas kehendak aspirasi masyarakat Indonesia.

Hal tersebut mengandung makna dan manfaat dari otonomi daerah dimana akan memberikan dampak positif bagi wilayah yang tertinggal. Sehingga dengan demikian wilayah yang mengalami otonomi khususnya masyarakatnya akan melahirkan kekuatan karena disuplai dengan berbagai kemudahan akses pemerintah baik itu segi perekonomian, keterbukaan, dan perlindungan hukum yang ada dalam undang-undang. Selain itu pemerintah otonomi juga menjadi mentor untuk menstabilkan kemajuan dalam perkembangan wilayahnya.<sup>17</sup>

Berbagai manfaat yang diperoleh dari otonomi daerah namun perlu diketahui juga tentang komponen utama wajib terkait otonomi. Komponen tersebut antara lain yaitu komponen wewenang melaksanakan dan memutuskan strategi. Komponen tersebut sering diartikan dengan konsep "pemerintahan" yang terkandung dalam makna kata otonomi. Kemudian komponen selanjutnya yaitu aspek kebebasan yang berdasarkan prinsip dari dan untuk masyarakat sendiri.

18

---

<sup>16</sup> A. Ubaedillah, dkk, *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Indonesia Center For Civic Education, 2000), h.170

<sup>17</sup> Komaruddin Hidayat dan Azyumardi Azra, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h.155

<sup>18</sup> Ny. Arie Sukanti Hatagalung dan Markus Gunawan, *Op.Cit.*, h.101

Selanjutnya terdapat juga lembaga-lembaga formal diluar pemerintah formal dalam peningkatan dan pengawasan kewajiban peraturan yang di setuju oleh pemerintah wilayah.<sup>19</sup>

Berbeda halnya prinsip daera otonomi yaitu keberagaman rakyat hukum yang memiliki wilayah tertentu dan kemampuan untuk menjalankan segala kepentingan masyarakat atas kehendak sendiri oleh pemerintah yang ikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan utama yang perlu direalisasikan dalam menjalankan kewajiban ini merupakan peningkatan pertumbuhan wilayah dari berbagai bidang antar lain bidang perekonomian, pembangunan, fasilitas umum, serta pelayanan bagi masyarakat. Selain aspek tersebut yang diwujudkan terdapat komponen wajib yaitu kemandirian wilayah kawasan dalam meningkatkan laju daya saing wilayah untuk mewujudkan peningkatan pertumbuhan.<sup>20</sup>

## 2. Teori Desentralisasi

Menurut Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 7, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, wewenang pemerintahan tersebut adalah wewenang yang diserahkan oleh pemerintah, sedangkan pemerintahan daerah hanya melaksanakan wewenang yang di berikan sesuai dengan aspirasi masyarakat daerahnya, walaupun sebenarnya daerah sendiri diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya secara luas, nyata, dan tanggung jawab.

Dengan adanya desentralisasi, maka akan berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah yang tertinggal dalam suatu negara agar

---

<sup>19</sup>*Ibid*, h.102

<sup>20</sup> HAW. Widjaja, *Op.Cit.*, h.76



daerah tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional.

- 1) Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan.
  - 2) Dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat, daerah tidak perlu menunggu instruksi lagi dari pemerintahan pusat.
  - 3) Dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setiap keputusan dapat segera dilaksanakan.
  - 4) Dalam sistem desentralisasi, dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan yang berguna bagi kepentingan tertentu.
  - 5) Khususnya desentralisasi teritorial, dapat lebih mudah menyesuaikan diri kepada kebutuhan dan kebutuhan khusus daerah.
  - 6) Mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari pemerintah pusat.
  - 7) Dari segi psikologis, desentralisasi dapat lebih memberikan kepuasan bagi daerah-daerah karena sifatnya yang lebih langsung.<sup>21</sup>
3. Konsep pemekaran
- Pemekaran wilayah (propinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa) merupakan dinamika kemauan politik masyarakat pada daerah-daerah yang memiliki cakupan luasan wilayah administratif cukup luas. Ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, pemerintah telah memberikan ruang bagi daerah untuk melakukan pemekaran wilayah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata pada setiap tingkatan

<sup>21</sup> Rika Oyadila. 2020. *Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita Di Kabupaten Bener Meriah*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh. Hal. 18-19

Berdasarkan ketentuan tersebut, pemekaran daerah dapat berupa penggabungan dari beberapa daerah atau bagian daerah yang berdekatan atau pemekaran dari satu daerah menjadi lebih dari satu daerah. Sedangkan secara substansi, pemekaran daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pemerintah pada masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan keserasian pembangunan antar pusat dan daerah. Selain itu diatas, pemekaran daerah dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal untuk sesuai potensi dan cita-cita daerah.<sup>22</sup>

Gagasan pemekaran wilayah dan pembentukan Daerah Otonom Baru memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Secara yuridis landasan yang memuat persoalan pembentukan daerah terdapat dalam pasal 18 UUD 1945 yang intinya, bahwa membagi daerah Indonesia atas daerah besar (provinsi) dan daerah provinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Selanjutnya dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi peluang pembentukan daerah dalam suatu NKRI, yaitu daerah yang dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.<sup>23</sup>

#### 4. Teori Daerah

Peraturan tentang Pemerintah Daerah disebutkan dalam pasal 18 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan

---

<sup>22</sup> Sidik Pramono dan Susie Berindra, "Pemekaran Tak Lagi Jadi "Obat" Mujarab", Kompas, 30 Agustus 2006 (Politik & Hukum), h. 5.

<sup>23</sup> Ahmad Muzawwir, "Analisis Kebijakan Pemekaran Wilayah Kabupaten Batu Bara dalam Perspektif Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000", Tesis, Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2008, h. 53.

Daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Dalam pasal 18 B sebagaimana dalam pasal (1) dijelaskan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.<sup>35</sup> Selanjutnya dalam pasal (2) dijelaskan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang diatur dalam Undang-Undang”.<sup>24</sup>

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (7) bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang, maka pada tahun 2004 ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Seiring berjalannya waktu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga Undang-Undang ini perlu diganti. Sehingga pada tahun 2014 diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> [http://repository.uin-suska.ac.id/18667/8/8.%20BAB%20III\\_\\_2018574IH.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/18667/8/8.%20BAB%20III__2018574IH.pdf)

<sup>25</sup> Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

### 2.3 Keuntungan Pemekaran

Tidak dapat dipungkiri bahwa manfaat pemekaran daerah untuk peningkatan kemandirian Daerah hasil pemekaran diharapkan dapat menjalankan roda perekonomian, kegiatan administrasi, penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Harapan dari penyelenggaraan dan pembangunan semua aspek tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat yang sejahtera akan menciptakan masyarakat yang mandiri dan pada gilirannya akan menciptakan daerah yang mandiri serta tidak tergantung terhadap daerah induk pemekaran, propinsi dan negara. Namun pemekaran daerah saat ini sulit dibedakan antara benar-benar suatu kebutuhan atau hanya kepentingan para elite politik baik daerah maupun pusat. Melalui pemekaran daerah terdapat peluang bagi calon Kepala Daerah, anggota DPRD dan jajaran unit eselon satu di daerah otonom baru (DOB). Seringkali, usulan pemekaran daerah oleh para elite politik diwarnai dengan keutuhan negara. Sebenarnya, semakin banyak DOB, maka kontrol terhadap daerah-daerah akan semakin kuat. Akan tetapi kontrol yang kuat tidak berarti kekuasaan Pemerintah Pusat semakin berkurang.<sup>26</sup>

Pemekaran Wilayah Dan Pelayanan Publik Pemekaran wilayah pada dasarnya bertujuan untuk lebih mendekatkan jarak antara pemerintah sebagai pelaksana pelayanan public dengan masyarakat sebagai penerima pelayanan. Pemekaran wilayah juga bertujuan untuk menjadikan pelayanan public bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Namun yang sebenarnya yang menjadi tujuan utama dari pemekaran wilayah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang dimekarkan. Ironisnya, tidak sedikit yang terjadi padawilayah yang baru dimekarkan

---

<sup>26</sup><https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2013/11/14/150901605172231-pemekaran-daerah-kebutuhan-atau-euforia-demokrasi-untungnya-pemekaran>.

justru beberapa fungsi pelayanan public tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kesiapan dari aparatur yang ditempatkan diwilayah yang baru dimekarkan itu. Salah satu masalah utama yang sering ditemui di wilayah-wilayah yang baru dimekarkan biasanya adalah kendala dalam mengisi struktur-struktur pemerintahan yang berfungsi melakukan pelayanan public. Hal ini jelas berdampak pada penyelenggaraan pelayanan public bagi masyarakat.

Masyarakat sebagai pihak yang dilayani tentunya mengharapkan bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal dari pihak-pihak yang sudah diberikan wewenang untuk itu. Pihak-pihak dimaksud adalah aparat pemerintah khususnya dalam hal ini yaitu aparatur pemerintah.

Pemekaran wilayah selayaknya sudah melalui pertimbangan-pertimbangan disamping memperhatikan persyaratan yang sudah diatur pemerintah dalam PP No. 129 tahun 2000 yang telah disempurnakan dengan PP No. 17 Tahun 2008 tentang pembentukan suatu daerah otonom. Dalam peraturan pemerintah tersebut sudah diatur bahwa pembentukan daerah otonom yang baru dimungkinkan dan harus memenuhi faktor-faktor antara lain: kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah disamping factor lain yaitu keamanan dan ketertiban, sarana dan prasarana, rentang kendali yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah seperti yang diharapkan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup><https://www.neliti.com/id/publications/1024/dampak-pemekaran-wilayah-terhadap-pelayanan-publik-suatu-studi-di-kantor-kecamatan>.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dan kualitatif, merupakan pengkajian terhadap kejadian-kejadian fakta dari sekelompok masyarakat yang meliputi penilaian sikap atau pendapat terhadap organisasi, keadaan, individu, ataupun prosedur. Sehingga tujuan yang diharapkan pada penelitian ini mampu membuka jalan terhadap objek yang diteliti.<sup>28</sup>

Selanjutnya dapat diketahui bahwa penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Berdasarkan pengertian penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang memberikan jawaban terhadap data deskriptif terkait informasi wawancara atau tulisan, dan tingkah laku yang dapat diminati dari orang-orang yang diteliti.<sup>29</sup>

#### **3.2. Lokas Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Simeulue ada beberapa hal yang membuat peneliti memilih lokasi tersebut adalah, karena langsung terhubung dengan pengelolaan pemerintahan baik melihat secara langsung bagaimana perkembangan dari pemekaran daerah setelah disahkannya Simeulue menjadi Kabupaten baik dalam segi ekonomi masyarakat Simeulue sehingga peneliti lebih paham dengan situasi tersebut.

Tujuan dari penelitian ini memberikan gambaran tentang *Analisis Dampak Pemekaran Daerah Di Kabupaten Simeulue* (Studi Deskriptif Pada Kantor DPRK Simeulue, Kantor Bupati Simeulue, Tokoh Masyarakat Simeulue ).

---

<sup>28</sup>Etta Mamang Sengaji Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*,(Yogyakarta:Andi,2010), hal 21.

<sup>29</sup> Ibid hal. 21

### 3.3 Fokus Penelitian.

Fokus penelitian yang akan saya teliti yaitu tentang “ Analisis Dampak Pemekaran Daerah di Kabupaten Simeulue”

### 3.4 Informan Penelitian

Dalam hal ini penulis mencantumkan nama-nama Informan yang ingin di wawancarai terkait dengan pengumpulan data yang penulis butuhkan:

#### PROFIL INFORMAN

NO	Nama	Profesi	Alamat
1	Ihya Ulumuddin, Sp, MH	Anggota DPRK Simeukue	Sinabang
2	Ugek Ferlian	Anggota DPRK Simeulue	Sinabang
3	Sahriman	Staf Ahli bupati bidang ekonomi dan pembangunan	Sinabang
4	Mukhri Mayadi	Kabag pembangunan Kabupaten Simeulue	Sinabang
5	Sarman Jayadi	Ketua Majelis Pendidikan Daerah	Sinabang
6	Husin Alim, S E	Ketua DPMD kabupaten Simeulue	Sinabang
7	Fatwa Gunawan, S.Sos	Kassubag Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Setdakab Simeulue	Sinabang

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Langkah-langkah dalam Teknik pengumpulan data sebagai upaya menghasilkan data penelitian yaitu:

#### 1. Observasi

Observasi yaitu kegiatan survey terhadap suatu keadaan yang dibutuhkan peneliti dengan secara langsung ataupun nyata.<sup>30</sup> Terdapat beberapa yang diperoleh dengan observasi diantaranya dapat melihat permasalahan secara detail terkait kebutuhan informasi data yang diperlukan. Sehingga langkah-langkah dalam wawancarapun memiliki tahapan sendiri.

#### 2. Observasi partisipan (*participant observation*)

Dalam observasi partisipan, pengamat ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subjek yang diteliti atau diamati, seolah-olah merupakan bagian dari mereka.

##### a) Observasi tidak partisipan (*non-participan observation*)

Dalam observasi ini pengamat berada diluar subjek penelitian yang diamati dan tidak dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non partisipan karena peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh informan, tetapi hanya melihat dan mengamati kegiatan yang mereka jelaskan tentang *Analisis Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemekaran Daerah*.

##### b) Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara sebagai bahan mendukung atau penambahan data dari proses observasi yang terdiri dari dua belah

<sup>30</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)*. (Jakarta: Raneka Cipta, 2010), hal.134.

<sup>31</sup>Soehartono Irawan, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hal.69-70



pihak yaitu pewawancara dan terwawancara.<sup>32</sup> Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.

#### 1. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap dalam pengumpulan datanya. Wawancara ini digunakan dalam pengumpulan data, peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi. Di samping instrument sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpulan data juga dapat menggunakan alat bantu seperti *tape recorder*, gambar, brosur dan material lain yang dapat membantu memudahkan proses wawancara.

#### 2. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini peneliti wawancara menggunakan wawancara terstruktur, dimana peneliti berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk mendapatkan data yang lebih akurat.

### 3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu langkah kritis dalam penelitian. Analisis data disebut juga dengan pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, penafsiran agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, dan ilmiah. Data dalam penelitian

<sup>32</sup>Husaini Usman Pumono Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal.57.

<sup>33</sup> sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta,2013), hal.130-191.

kualitatif terdiri dari deskripsi tentang fenomena (situasi, kegiatan, peristiwa) baik berupa kata-kata, angka maupun yang bisa diserakan.<sup>34</sup> Analisis data juga dapat dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran cukup menjanjikan table tunggal dengan jumlah dan persentase untuk setiap kategori.

Menurut pernyataan Miles dan Humberman dalam Sugiyono model penelitian yang menggunakan model analisis data mempunyai komponen tersendiri dalam mengasilkan data yang rangkul anatar lain: eduksi data (data redaction), data conclusion dan penyajian data.<sup>35</sup>

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan pengumpulan berdasarkan perkara inti serta memusatkan terhadap perkara yang paling mendasar sehingga mangambil data yang akan dijadikan serta membuang hal-hal data yang tidak penting dilapangan. Aktivitas mereduksi data dikerjakan apabila keseluruhan kegiatan wawancara kemudian merangkap hasil dari kegiatan wawancara. Tahapan selanjutnya yaitu meringkas pembahasan yang akan dijadikan data penelitian sehingga mudah dimengerti searah dengan keperluan penelitian. Biasanya pada tahap mereduksi data peneliti mangambil segenap pembahasan yang diperoleh dari lapangan dan jadikan sebagai rumusan masalah.

#### 2. Penyajian Data

Pada tahapan selanjutnya setelah mereduksi data yaitu dengan membuktikan data hasil dari lapangan dengan mangaitkan sumber yang teruji secara ilmiah. Biasanya penyajian data dilaksanakan dengan membentuk model atau semacamnya yang mengacu pada masalah penelitian. Mengurutkan kalimat berbentuk narasi hingga menghubungkan

<sup>34</sup>Imam suparyoga, Tabarno, *Metode Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung:Remaja Rosdarya,2003), hal.191.

<sup>35</sup> sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta,2013), hal.246-252.

pada tujuan penelitian yang telah dilakukan dengan pertanyaan gagasan penelitian yang telah ditentukan.

3. *Conclusion drawing/verification* (Penarikan Kesimpulan)

Suatu rangkaian hasil penelitian tetap mengalami perubahan sejalan dengan ditemukannya sumber-sumber terbaru dalam penyajian data. Apabila data yang dimiliki telah mencukupi dalam menjawab permasalahan pada rumusan penelitian, selanjutnya data segera disimpulkan. Pada tahapan berikutnya peneliti merangkum segala gagasan yang berkaitan pokok-pokok pembahasan terkait penelitian yang dilakukan tentang “*Analisis Dampak Pemekaran Daerah di Kabupaten Simeulue*”.



## BAB IV HASIL PENELITIAN

### 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Simeulue merupakan kawasan daerah kepulauan dengan bentuk pemerintahan kabupaten yang berawal dari lahirnya undang-undang No 48 Tahun 1999. Kabupaten Simeulue merupakan hasil dari pemekaran wilayah Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh dengan luas daerah mencapai 183.809,50 Ha. Kabupaten Simeulue merupakan kawasan wilayah yang sangat berbeda dengan Kabupaten yang terdapat di Provinsi Aceh. Salah satu keunikan dan kekurangan yang dimiliki Kabupaten Simeulue tingkat kekayaan sumber daya perairan lautnya.

Namun tingkat akses untuk menempuh wilayah Kabupaten Simeulue hanya dilalui beberapa akses dari daerah Provinsi yaitu dengan jalur laut dan jalur udara hal tersebut disebabkan wilayah kabupaten Simeulue terpisah oleh lautan dengan wilayah Provinsi. Jalur perairan laut dapat diakses dari empat titik, yaitu Labuan Haji (Kabupaten Aceh Selatan) berjarak 141 Km, Meulaboh (Kabupaten Aceh Barat) berjarak 167 Km, Singkil berjarak 201 Km, dan Calang (Aceh Jaya) berjarak 256 Km. Melalui jalur udara Kabupaten Simeulue dapat diakses dari tiga titik, yaitu Bandara Cut Nyak Dhien Meulaboh Aceh Barat berjarak 158 Km, Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar berjarak 360 Km, dan Bandara Kuala Namu Medan berjarak 314 Km.

Perwujudan reformasi yang nyata oleh pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kemajuan diwilayah yang sangat sulit diperhatikan oleh pemerintah pusat. Sehingga dengan adanya pembagian wilayah maka akan terlaksananya sarana-prasarana pembangunan yang mudah dikontrol oleh Pemerintah secara profesionalisme, transparansi, akuntabilitas dan efektifitas kemajuan daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat.

#### 4.1.1. Profil Kabupaten Simeulue

Provinsi Aceh melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 telah melahirkan berbagai wilayah yang mengatur sistem pemerintahannya sendiri diantaranya daerah Kabupaten Bireuen dan Darah Kabupaten Simeulue. Pusat pemerintahan Kabupaten Simeulue yaitu Sinabang dengan luas daerah 2.051,48 Km<sup>2</sup><sup>36</sup>.

Secara astronomis Kabupaten Simeulue berada antara 02° 02' 03''- 03° 02' 04'' Lintang Utara dan 95° 22' 15'' – 96° 42' 45'' Bujur Timur. Lebar wilayah 8 – 28 km dan Panjang wilayah Simeulue ± 100,2 km. Kabupaten Simeulue merupakan wilayah yang dianugrahi oleh pulau-pulau besar maupun pulau-pulau kecil. Jumlah Pulau yang ada di wilayah Simeulue mencapai ± 57 pulau. Luas wilayah daratan pulau besar maupun pulau-pulau kecil mencapai 212.512 ha.

Berdasarkan wilayah pembagian yang ada di Kabupaten Simeulue memiliki 10 kecamatan dengan jumlah desa 138 desa yang ada di Wilayah Simeulue sebagai usaha peningkatan pembangunan daerah Simeulue. Kecamatan yang dijadikan di Kabupaten Simeulue yaitu; Simeulue Barat, Simeulue Timur, Simeulue Tengah, Simeulue Cut, Teupah Tengah, Teupa Selatan, Teupah Barat, Teluk Dalam, Alafan, dan Salang. Tingkat kepadatan penduduk yang ada di Kabupaten Simeulue mencapai 94.876.

#### 4.1.2. Sejarah Kabupaten Simeulue

Jika melihat sejarah lahirnya Kabupaten Simeulue maka akan menemukan berbagai hal yang sangat mengguncangkan jiwa pemerinta pusat dikarenakan wilayah Kabupaten Simeulue sendiri cukup sulit dalam akses pembangunanya hal tersebut dikarenakan jangkauan yang dihalangi laut sebagai upaya pemerintah dalam pembangunan daerah. Maka Pemerintah Provinsi Aceh melakukan pemekaran salah satunya adalah Kabupaten

---

<sup>36</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Simeulue

Simeulue. Kabupaten yang tegar di Samudra Indonesia, dengan wilayah perairan laut sebagai perbatasannya. Dengan demikian Kabupaten Simeulue menjadi daerah yang mengatur sistem pemerintahannya sendiri dengan naungan Pemerintah pusat.<sup>37</sup>

Setiap daerah hasil pemekaran dari Provinsi tentunya memiliki sejumlah peningkatan pembangunan, dan pelayanan pemerintahan antara lain pusat pemerintahan daerah seperti Ibu kota . Sinabang merupakan ibu kota Kabupaten Simeulue. Sinabang sendiri merupakan logat yang dibawa ke daerah luar seperti sudah keluar dari kabupaten Simeulue. Namun masyarakat Simeulue sendiri kota Sinabang lebih dominan mengucapkannya dengan sebutan "Si Navang" yang telah turun tumurun dari legenda Navang. Navang sendiri merupakan seorang masyarakat Kabupaten Simeulue yang memproduksi garam sendiri tepatnya di daerah Babang (Pintu masih teluk Sinabang). Dahulu kala Navang memproduksi garam dengan strategi membendung air laut yang mengalir di perairan Babang, selanjutnya dikeringkan baru diolah menjadi garam. Seiring berjalannya waktu garam hasil produksi Navang menjadi populer dikalangan masyarakat tepatnya daerah Ujung Panarusan hingga daerah Lugu. Kepentingan garam oleh masyarakat semakin melunjak dari berbagai daerah yang ada di Kabupaten Simeulue, maka untuk memperolehnya akan ke daerah Si Navang. Kegiatan tersebut berjalan terus menerus hingga perubahan kata Navang pun berubah menjadi Nabang.

Selain daerah Sinabang yang memiliki sejarah yang unik, daerah yang ada di Kabupaten Simeulue lainnya memiliki rangkaian sejarah yang unik seperti Salah satu Kota Bagian barat Simeulue yaitu Sibigo. Sibigo berasal dari kata/kalimat CV dan Co yang diberikan oleh penjajah karena daerah tersebut dijadikan tempat pencarian sekaligus pabrik kayu yang memiliki kekuatan serta nilai tinggi jika di jual ke luar negeri seperti Belanda.

---

<sup>37</sup> <https://simeuluekab.go.id/halaman/tentang-simeulue> diakses pada tanggal 9 Februari 2023 jam 22.00 WIB

Potensi kedudukan Simeulue menjadi suatu Pemerintahan Kabupaten telah diusahakan sejak dahulu yang bersumber dari aspirasi masyarakat leluhur daerah Simeulue dari berbagai tokoh masyarakat yang diikuti oleh masyarakat lainnya dengan kesadaran kemajuan pembangunan tampah ada paksaan. Dasar gerakan perjuangan para cendekiawan masyarakat yang ada di Simeulue yang mengusulkan pada tahun 1956, hal tersebut mengalami hambatan yang tidak bisa digugat. Sehingga terjadilah kongres rakyat Simeulue tahun 1957. Sehingga pada tahun 1957 juga berkunjung Gubernur Aceh yang pada saat itu dijabat Prof. Ali Hasjmi sebagai bukti dan dukungan terhadap masyarakatnya yang berkeinginan meningkatkan kemajuan dalam daerahnya yaitu Simeulue.<sup>38</sup>

Selanjutnya tahun 1963 lagi dan lagi para cendekiawan Simeulue bermusyawarah di daerah Luan Balu dan dilakukan masyarakat yang sama pada tahun 1980. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut terdapat satu gagasan utama dan penting dibenamkan di dalam hati dan cita-cita masyarakat Simeulue yaitu menjadikan Simeulue menjadi Pemerintah Kabupaten yang otonom. Tahun demi tahun berlalu tekat yang sudah bulat dalam benak masyarakat Simeulue mendapat respon positif dari kalangan Pusat pemerintahan Aceh yaitu DPRD tingkat I Aceh dan Tingkat II Aceh Barat<sup>39</sup>

Pertumbuhan pemerintahan selanjutnya membutuhkan seorang Pemimpin dengan tugas Pembantuan Bupati Kabupaten Simeulue yaitu Drs. Muhammad Amin. Seterusnya kepemimpinan tersebut masih upayakan masyarakat Simeulue sehingga Tim Gubernur Aceh kembali melakukan perjalanan ke Simeulue di ikuti oleh Dirjen Bangda ke Simeulue tepatnya tanggal 12 Desember 1995.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> <https://simeuluekab.go.id/halaman/tentang-simeulue> diakses pada tanggal 9 Februari 2023 jam 22.00 WIB

<sup>39</sup> <https://simeuluekab.go.id/halaman/tentang-simeulue>

<sup>40</sup> <https://simeuluekab.go.id/halaman/tentang-simeulue>

Masa dari segala usah yang diperlukan masyarakat cendekiawan Simeulue masih berlanjut, dengan hadirnya Dirjen PUOD, DPODS, dan Komisi II DPR RI pada tanggal 30 Maret 1996 sekaligus memutuskan musyawarah umum di halaman pendopo pembantu Bupati Simeulue. Pada masa tersebut J. Sondakh sebagai pemimpin komisi II DPR RI menyatakan musyawarah hari tersebut diumpamakan bagaikan Sidang DPR RI diluar gedung hal tersebut disebabkan kedatangan semua fraksi antara lain: Fraksi PDI, Golkar, PPP dan fraksi utusan Daerah.

Sehingga beliau memberikan perjanjian bahwasanya Simeulue akan dijadikan Pemerintahan dalam waktu singkat kedepannya. Rasa syukur atas nikmat Allah SWT yang disertai keringat perjuangan para cendekiawan serta cita-cita yang tinggi dan komitmen yang dimiliki masyarakat Simeulue menganugerahkan amanat Pemerintah Kabupaten dengan tanda persetujuan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak H. Muhammad Sueharto pada tanggal 17 Agustus 1996, PP 53 Tahun 1996 terkait kemajuan status wilayah Pembantu Bupati Simeulue menjadi Kabupaten Administratif Simeulue. Sehingga pada tanggal 27 September 1996 berkawasan di DPRD Daerah Keistimewaan Nanggroe Aceh, Kabupaten Administratif Simeulue diresmikan bapak Menteri Dalam Negeri Bapak Yogie S. Memet yang diteruskan pelantikan Drs. H. Muhammad Amin sebagai pemimpin Bupati Administratif Simeulue.<sup>41</sup>

Masyarakat Simeulue sangat bergembira dan senang atas dilantiknya Drs. H. Muhammad Amin sebagai pemimpin Kabupaten Administratif Simeulue yang menunjukkan bahwasanya Simeulue telah menjadi Pemerintah sendiri yang dilindungi Undang-undang. Berita tersebut menyebar ke seluruh pelosok negeri Simeulue. Dengan status yang dimiliki Simeulue pada saat itu masyarakat Simeulue masih kurang puas sehingga Simeulue betul-betul menjadi daerah pemerintahan sendiri tau otonom.

Sehingga dalam segala bentuk tindakan dilakukan melalui pemikiran cendekiawan sekaligus toko-toko masyarakat Simeulue dengan segenap jiwa

---

<sup>41</sup> <https://simeuluekab.go.id/halaman/tentang-simeulue>



berharap kepada Pemerintah Provinsi Aceh agar dapat mengabulkan permintaan masyarakat Simeulue. Hal tak terduga melalui Undang-undangan No 48 Tahun 1999 terbentuklah Kabupaten Simeulue yang bersamaan dengan Kabupaten Bireuen yang berstatus daerah sendiri/otonom dalam naungan Pemerintah Indonesia

Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 1999 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ad Interim Faisal Tanjung meresmikan lahirnya Kabupaten Simeulue sehingga tanggal tersebut dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Simeulue yang di kenang-kenang.<sup>42</sup>

Dalam perjalanan sejarahnya sejak Proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia Kabupaten Simeulue telah dipimpin oleh beberapa tokoh mulai dari Wedana, Pembantu Bupati, dan Bupati antara lain :

1. Teuku Raja Mahmud (1945-1950)
2. Muhammad Hasan Basri (1950-1955)
3. Hasbi Usman (1955-1958)
4. Tjoet Mamad (1958-1962)
5. Teuku Raja Mahmud (1962-1964)
6. Teuku Banta Bugis (1964-1965)
7. Tgk. Muhammad Rasyidin (1965-1969)
8. Letkol Ali Hasan (1969-1972)
9. Mayor Juliadin (1972-1977)
10. Mayor Kassah (1977-1984)
11. Drs. H. Adriman Kimat (1984-1994)
12. Drs. H. Muhammad Amin (1994-1996).

#### 4.1.3. Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Simeulue

Sesuai hasil peneliti dengan pejabat perkantoran Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue mengatakan tentang sumber pendapatan masyarakat

<sup>42</sup> <https://simeuluekab.go.id/halaman/tentang-simeulue>

yang ada di wilayah Kabupaten Simeulue memuai hasil dari berbagai sumber.<sup>43</sup>

Sumber pendapatan masyarakat Simeulue, yang merupakan sebuah kabupaten di Aceh, Indonesia, didominasi oleh sektor-sektor berikut:

**Pertanian:** Perekonomian merupakan sumber pendapatan utama yang dijalankan hampir keseluruhan masyarakat Kabupaten Simeulue. Masyarakat di daerah ini biasanya terlibat dalam bertani, berkebun cengkih, dan beberapa tanaman lainnya. Mereka juga terlibat dalam peternakan seperti ternak sapi, kerbau.

**Perikanan:** Simeulue adalah pulau yang dikelilingi oleh laut, sehingga sektor perikanan memiliki peran penting dalam mata pencaharian masyarakatnya. Nelayan di daerah ini berdagang hewan-hewan laut seperti ikan kerapu, ikan tongkol, gurita, teripang, lobster dan cumi-cumi. Selain itu, sebagian masyarakat juga terlibat dalam pembuatan dan perbaikan peralatan perikanan.

**Perdagangan:** Kegiatan perdagangan merupakan hal yang diutamakan masyarakat Kabupaten Simeulue sebagai usaha perkembangan. Beberapa penduduk terlibat dalam berbagai bentuk usaha perdagangan, seperti membuka warung, toko kelontong, atau pedagang pasar.

**Industri Kerajinan:** Masyarakat Simeulue terampil dalam pembuatan berbagai kerajinan tangan tradisional, seperti anyaman pandan.

**Pariwisata:** Meskipun pariwisata masih berkembang di Simeulue, sektor ini menjadi potensi penting dalam menciptakan mata pencaharian baru. Wisatawan datang untuk menikmati keindahan pantai, selancar, menyelam, dan kegiatan wisata alam lainnya. Oleh karena itu, beberapa masyarakat telah mulai bergerak di bidang pariwisata, seperti pengelolaan penginapan, penyedia jasa tur, dan penjualan produk-produk wisata.

**Pelayanan Publik dan Swasta:** Beberapa penduduk juga terlibat dalam sektor pelayanan publik dan swasta, seperti tenaga kesehatan, guru, pegawai pemerintah, dan karyawan swasta di sektor layanan dan perdagangan. Dari

---

<sup>43</sup> Wawancara di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue Tanggal 10 Februari 2023.

uraian diatas penduduk Kabupaten Simeulue mayoritas sebagai petani dan nelayan.

## 4.2 Visi-Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Simeulue

### 1.2.1. Visi

Visi merupakan gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan visi dan misi tersebut dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-indikatornya. Visi Kabupaten Simeulue Tahun 2017-2022 adalah: ***“Terwujudnya Masyarakat Simeulue Yang Adil dan Sejahtera Berdasarkan Nilai-Nilai Syariat”***.<sup>44</sup>

Makna Visi tersebut adalah:

1. Adil, yaitu masyarakat Kabupaten Simeulue yang memiliki akses dan jangkauan akan layanan kesehatan, pendidikan, ekonomi dan infrastruktur yang merata tanpa membeda-bedakan asal-usul, sehingga kesenjangan pelayanan masyarakat diseluruh kecamatan tidak timpang.
2. Sejahtera, yaitu suatu kondisi terpenuhinya hak-hak dasar secara layak mencakup pemenuhan pangan, pelayanan kesehatan, pekerjaan dan kesempatan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dan tentram serta pemenuhan hak untuk berpartisipasi didalam kegiatan pembangunan, politik, dan sosial kemasyarakatan.
3. Nilai-Nilai Syariat, yaitu suatu kondisi meningkatnya nuansa-nuansa islami dalam hidup dan kehidupan masyarakat yang ditandai dengan penerapan nilai-nilai islami dalam seluruh aktivitas kehidupan masyarakat, berperilaku jujur, berakhlak mulia, adil dan bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu pengetahuan tinggi, terwujudnya keluarga yang sakinah, serta senantiasa memelihara hubungan yang harmonis sesama antar umat beragama.

<sup>44</sup> Dimuat dalam Renstra Pemerintah Kabupaten Simeulue 2017-2022.

### 1.2.2. Misi

Sedangkan Misi Pemerintah Kabupaten Simeulue sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan merata.
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan dan pemanfaatan teknologi.
- d. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan amanah.
- e. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan fasilitas umum.
- f. Mengelola sumber daya alam secara optimal, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.
- g. Mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian pangan.
- h. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang rukun dan harmoni dengan pengamalan nilai-nilai syariat.
- i. Membangun hubungan baik dengan pemerintah daerah lain, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.

### 4.3 Dampak Pemekaran Kabupaten Simeulue Dalam Bidang Pelayanan Publik

Pemekaran daerah merupakan fenomena yang sering terjadi dalam upaya memperbaiki tata kelola wilayah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di berbagai negara di dunia, pemekaran daerah telah menjadi langkah strategis untuk menangani tantangan pembangunan, kebutuhan masyarakat yang berkembang, dan meningkatkan efisiensi administrasi.

Setelah terjadi pemekaran di Kabupaten Simeulue terjadi perubahan signifikan dalam hal pelayanan publik, hal ini dipengaruhi oleh konsep daerah otonomi yang mengharuskan daerah pemekaran tersebut berhak untuk mengurus daerahnya sendiri. Dimasa masih dalam sistem perwakilan kabupaten (Perwakab), segala sesuatunya Kabupaten Simeulue harus melalui

birokrasi yang berlaku di Kabupaten Aceh Barat. Setiap segi baik itu pemerintahan, pendidikan, ekonomi dan sebagainya Kabupaten Simeulue mendapatkan akses yang lebih sedikit.

Kabupaten Simeulue kini telah memiliki kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sendiri yang berfungsi sebagai pelayanan publik kepada masyarakat Simeulue sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang administrasi kependudukan.

Salah satu fungsi dari pemekaran daerah yaitu mensejahterakan masyarakat dalam skala keseluruhan dalam wilayahnya. Terdapat sejumlah argumen mengapa pemekaran daerah zaman sekarang yang diminati oleh suatu kebijakan yang cukup diinginkan dengan pembentukan pemerintahan daerah serta kemajuan pelayanan masyarakat yaitu:<sup>45</sup>

1. Meningkatkan pertumbuhan kemajuan perekonomian masyarakat lokal dengan mengatur sistem pengembangan perekonomian daerah menjadi produk lokal.
2. Pemasukan tenaga kerja dengan luas di bidang pemerintahan dan mengalokasikan wewenang di bidang politik serta pemerintahan.
3. Menciptakan dan menjalankan pelayanan masyarakat yang lebih maju dalam kawasan daerah otonom Kabupaten Simeulue secara terstruktur

Gagasan pemerintah melalui Undang-undang Nomor 129 Tahun 2000 Pasal 2 menjelaskan bahwa beberapa manfaat dalam menciptakan pemekaran wilayah di antaranya sebagai upaya dalam mensejahterakan masyarakat dengan kemajuan pelayanan masyarakat, pengembangan sektor perekonomian, pengelolaan hasil daerah dan percepatan pembangunan infrastruktur.<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Yayan Amroni. Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Lampung Barat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2010-2016. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung hlm.72-73

<sup>46</sup> Peraturan pemerintah No 129 Tahun 2000.

Pemekaran wilayah sangat berdampak nyata terhadap pertumbuhan dan kelancaran pelayanan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Gagasan untuk menyangkut pelayanan masyarakat meningkat yaitu jarak wilayah daerah dari pelayanan terkait semakin dekat. Jika diukur sebelum dimekarkan suatu pemerintahan..

Udah sadar dalam menjalankan efektivitas dan kualitas dari pelayanan masyarakat terhadap kinerja dapat diketahui dari bidang pendidikan, fasilitas transportasi darat dan fasilitas kesehatan..

Wujud dari pelayanan masyarakat yang diberikan kepada masyarakat wilayah kewenangan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 63 Tahun 2003, terkait tugas jenis pelayanan yaitu: pelayanan jasa, pelayanan administratif, dan pelayanan barang

Berdasarkan pengertian dari pelayanan administratif yaitu pelayanan yang ditujukan oleh pemerintah sebagai wujud kebutuhan masyarakat seperti pembuatan akta kelahiran, sertifikat tanah, Kartu Tanda Penduduk, Surat Berkendaraan Bermotor, Surat Izin mendirikan Perusahaan dan dokumen Penting lainnya.

Pelayanan administrasi juga dapat diartikan dengan pelayanan administratif juga dapat diartikan sebagai pelayanan tentang pendataan, pengambilan keputusan, dekomentasi, dan surat-menyurat lainnya yang dapat jadikan masyarakat sebagai acuannya dalam menjalankan diri sebagai masyarakat yang taat hukum.<sup>47</sup>

Wawancara peneliti dengan salah satu tokoh Simeulue, beliau menjelaskan bahwa dari segi pelayanan, masyarakat Simeulue kini mendapatkan akses yang lebih mudah. Tidak seperti dulu, membuat akta kelahiran, tanda kependudukan bahkan akta tanah sudah bisa diurus disini, tidak lagi harus menunggu waktu yang lama.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Pasolong, Harbani, *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta: Bandung, 2007. hal

<sup>48</sup> Wawancara dengan Ihya Ulumudin, Anggota DPRK Kabupaten Simeulue periode 2014-2019/2019-Sekarang pada tanggal 08 Maret 2023

*“Pada saat ini pelayanan kepada masyarakat di Simeulue sudah baik, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan dengan mudah, contohnya saja pelayanan kependudukan di dinas capil tidak harus menunggu hingga berbulan bulan seperti dulu.”<sup>49</sup>*

Dari wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Kabupaten Simeulue Pada saat ini, pelayanan kepada masyarakat di Simeulue telah mengalami perbaikan yang signifikan. Masyarakat sekarang dapat dengan mudah mendapatkan layanan yang mereka butuhkan, seperti pelayanan kependudukan di dinas capil. Tidak seperti sebelumnya, di mana masyarakat harus menunggu berbulan-bulan untuk mendapatkan layanan tersebut.

Pada wawancara peneliti yang berbeda dengan informan lain menunjukan pelayanan publik di Kabupaten Simeulue masih rendah dikarenakan kurangnya disiplin masuk kantor dari pegawai.

*“..... saya sudah beberapa kali datang kesini untuk mengurus keperluan saya ganti pekerjaan di KTP dan ubah Kartu Keluarga, pernah juga untuk membuat akta kelahiran anak saya, baru ada pelayanan diatas jam 9 pagi, kalau siang jam 3 baru ada pelayanan.”*

Kedua, pelayanan barang adalah pelayanan yang sangat penting karena biasanya menghasilkan segala bentuk pelayanan yang melahirkan kepentingan kepada seluruh masyarakat yang berdaerah terpencil hingga ke desa-desa besar antar lain air bersih, aliran listrik dan aliran jaringan telekomunikasi

Wawancara peneliti dengan Marjudin salah seorang warga desa lhok Makmur Kecamatan Simeulue barat menyatakan bahwa,

*“Setelah pemekaran pembangunan sarana dan prasarana di Simeulue sudah dikatakan baik karna jalan lingkak simeulue sudah tembus, akan tetapi di desa kami sampai saat ini belum tersentuh aspal sama sekali,*

---

<sup>49</sup> Wawancara penulis dengan Sarman Jayadi, Ketua Majelis Pendidikan Daerah (MPD) tanggal 01 Maret 2023

*bahkan kami masih pakai jasa rakit untuk menyebrang dari Desa Mieteum ke Sibigo untuk mempercepat waktu menuju Kota Sinabang”.*<sup>50</sup>

Dapat dilihat dari wawancara diatas bahwa sarana prasarana di Kabupaten Simeulue belum maksimal, didaerah terpencil yang jauh dari ibu kota kabupaten masih harus ditingkatkan karena umur Kabupaten Simeulue dihitung sudah memasuki usia 23 Tahun sejak terjadi pemekaran.

Ketiga, Pelayanan jasa merupakan susunan kegiatan yang berbentuk tidak nampak (Maya) yang digunakan sebagai dampak komunikasi antara pemakai dengan kepegawaian ataupun hal lain yang diberikan oleh perusahaan pemberi layanan dengan maksud agar mengetahui problem pelanggan atau konsumen. Terdapat beberapa aktivitas kegiatan dari pelayanan jasa antara lain seperti Transportasi, Kesehatan dan Pendidikan

Peningkatan sector pendidikan merupakan hal yang paling utama dari manfaat pelayanan masyarakat karena pendidikan sudah di amanatkan oleh konstitusi kita warga negara Indonesia yaitu meningkatkan kecerdasan berkehidupan berbangsa bernegara sekaligus menyediakan pendidikan yang sesuai dan berhak masyarakat mana pun dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mendapat pendidikan. Terdapat langkah dan gagasan yang di jalankan sesuai Undang-undang yang menyebutkan bahwasanya perlu setiap warga ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan perluasan pendidikan namun apakah daya jika dilihat dari kondisi lapangan yang membuat kerataan pendidikan Indonesia belum terwujudkan.

---

<sup>50</sup> Wawancara penulis dengan Marjidin warga desa lhok makmur kec.simeulue barat tgl 15 maret 2023.



No.	Kabupaten/ Kota	Tidak sekolah/ tidak tamat SD	SD/ MI/ SDLB/ Paket A	SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B	SMA/ MA/ SMK/ MAK/ SMLB/ Paket C	Diploma I- III	D IV/ S1- S3
1	Simeulue	19,46	28,97	16,99	24,14	3,70	6,73
2	Aceh Singkil	25,81	23,42	15,46	24,41	3,17	7,73
3	Aceh Selatan	20,78	27,67	20,93	20,11	3,78	6,73
4	Aceh Tenggara	19,68	23,32	19,81	27,50	3,04	6,58
5	Aceh Timur	21,61	31,09	20,57	21,13	1,94	3,65
6	Aceh Tengah	16,67	21,94	22,55	28,65	2,41	7,77
7	Aceh Barat	14,78	27,15	18,89	28,49	4,17	6,51
8	Aceh Besar	20,69	18,14	20,23	24,89	5,25	10,79
9	Pidie	18,50	22,60	23,04	25,01	3,99	6,87
10	Bireuen	18,03	25,45	22,09	24,69	3,05	6,69
11	Aceh Utara	18,42	31,97	21,32	22,15	1,56	4,59
12	Aceh Barat Daya	21,88	30,62	15,67	22,42	3,08	6,33
13	Gayo Lues	23,95	26,72	16,55	19,81	2,80	10,17
14	Aceh Tamiang	20,69	26,22	17,75	26,29	3,29	5,77
15	Nagan Raya	21,99	26,19	18,67	24,74	3,57	4,84
16	Aceh Jaya	18,43	31,82	17,67	23,16	2,79	6,14
17	Bener Meriah	14,23	23,19	24,94	30,22	2,30	5,13
18	Pidie Jaya	17,89	23,36	24,07	24,87	2,19	7,62
19	Banda Aceh	12,68	7,42	14,81	39,56	6,41	19,12
20	Sabang	11,93	14,85	15,86	38,50	6,14	12,72
21	Langsa	15,19	13,73	16,28	38,12	3,24	13,43
22	Lhokseumawe	12,02	19,92	15,46	38,14	3,57	10,89
23	Subulussalam	22,24	29,19	17,56	21,89	2,56	6,57
	<b>Aceh</b>	<b>18,58</b>	<b>24,43</b>	<b>19,85</b>	<b>26,25</b>	<b>3,30</b>	<b>7,60</b>

Data: BPS Provinsi Aceh 2018

Dari data diatas dapat kita bandingkan dengan beberapa kabupaten yang juga sebagai daerah pemekaran sebagai berikut:

No	Daerah	Tidak Sekolah/ Tidak Tamat SD(%)	SD/MI/S DLB/Pa ket A (%)	SMP/MTs /SMPLB/ Paket B(%)	SMA/MA/ SMK/SM LB/Paket C(%)	Diploma I-III (%)	D IV/S1- S3
1	Simeulue	19.46	28.97	16.99	24.14	3.70	6.73
2	Bireuen	18.03	25.45	22.09	24.69	3.05	6.69
3	Aceh Tenggara	19.68	23.32	19.81	27.50	3.04	6.58
4	Gayo Lues	23.95	26.72	16.55	19.81	2.80	10.17
5	Subulussalam	22.24	29.19	17.56	21.89	2.56	6.57

Dengan melihat data tersebut, terlihat variasi dalam tingkat pendidikan antara Kabupaten Simeulue, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Gayo Lues, dan Kabupaten Subulussalam. Setiap kabupaten memiliki persentase yang berbeda dalam hal penduduk yang tidak sekolah, tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Kabupaten Simeulue untuk lulusan D I-III Memiliki angka persentase tertinggi disusul oleh kabupaten Bireun pada urutan kedua dan Aceh Tenggara pada urutan ke tiga. Sedangkan untuk tingkat D-IV-S3 Kabupaten Simeulue menempati urutan kedua setelah Kabupaten Gayo Lues disusul oleh Kabupaten Bireun pada urutan ketiga.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan data yang disebutkan:

No	Kategori Pendidikan	Persentase Penduduk
1	Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD	19,46%
2	SD/MI/SDLB/Paket A	28,97%
3	SMP/MTs/SMPLB/Paket B	16,99%
4	SMA/MA/SMK/MAK/SMLB/Paket C	24,14%
5	Diploma I-III	3,70%
6	D IV/S1-S3	6,73%

Tabel di atas menggambarkan persentase penduduk Kabupaten Simeulue berdasarkan tingkat pendidikan. Terlihat bahwa 19,46% penduduk tidak sekolah atau tidak tamat SD, 28,97% memiliki ijazah setara SD, 16,99% memiliki ijazah setara SMP, 24,14% memiliki ijazah setara SMA, 3,70% telah menyelesaikan pendidikan tingkat D I-III, dan 6,73% telah menyelesaikan pendidikan tingkat S1-S3. Data ini menunjukkan bahwa masih ada sebagian penduduk yang memiliki tingkat pendidikan setara SMP, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Simeulue.

Kabupaten Simeule kaitannya dengan pelayanan jasa di sektor pendidikan, ketersediaan sarana pendidikan tenaga pendidik masih menjadi tantangan tersendiri.

Kabupaten Simeulue dalam hal pelayanan publik dibidang kesehatan telah dirasakan banyak terbantu pasca pemekaran daerah. Kehadiran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) berikut fasilitasnya yang memudahkan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang memadai walaupun belum

sepenuhnya terpenuhi.<sup>51</sup> Kemudahan akses kesehatan tersebut semakin dirasakan dengan hadirnya BPJS Kesehatan yang menjamin berobat secara gratis di Rumah Sakit maupun pukesmas terdekat disetiap kecamatan. Pada saat ini pukesmas di Kabupaten Simeulue berjumlah 11 Pukesmas.

*“dari segi pelayanan mungkin tidak semaksimal didaerah daerah lain, tapi kehadiran rumah sakit sangat membantu masyarakat dalam berobat. Masyarakat tidak harus ke banda aceh langsung untuk mendapatkan layanan kesehatan, sekarang sudah mudah, apalagi ada BPJS yang menanggung biaya pengobatan masyarakat.”*

Pelayanan publik dibidang transportasi pada saat ini semakin mudah dan murah. Setiap hari transportasi darat jenis Bus Damri di sediakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Simeulue untuk memudahkan masyarakat menuju dan dari pusat kota Sinabang, kecuali pada hari sabtu dan minggu atau hari libur lainnya tidak beroperasi. Transportasi bus ini hanya mematok tiket sebesar Rp. 20.000.- (Dua Puluh Ribu Rupiah) saja.<sup>52</sup>

Wawancara dengan Kadishub Simeulue, beliau menjelaskan bahwa saat ini pemerintah Kabupaten Simeulue sudah menyediakan layanan transportasi darat jenis bus untuk memudahkan masyarakat.

*“iya, sekarang sudah ada Bus Damri untuk menjangkau kecamatan terjauh di Kabupaten Simeulue yaitu Kecamatan Simeulue Barat dan Alafan. Biayanya cukup murah cuma dua puluh ribu dan tersedia setiap hari kecuali hari minggu dan tanggal merah.”*

Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan berbagai keterbatasan sebagai wilayah yang jauh dari ibu kota Provinsi Aceh, pelayanan publik dibidang jasa transportasi di kabupaten simeulue semakin

<sup>51</sup> Wawancara peneliti dengan Ugek Ferlian anggota DPRK Kab. Simeulue pada tanggal 06 Maret 2023.

<sup>52</sup> Wawancara peneliti dengan Sarman Jayadi, Ketua Majelis Pendidikan Daerah (MPD) tanggal 01 Maret 2023.

membalik. Masyarakat menjadi semakin mudah dan untuk bisa ke ibu kota kabupaten tersebut.

Tidak hanya itu, pada saat ini masyarakat Kabupaten Simeulue tidak harus melakukan perjalanan 1 hari menuju kota, sekarang dapat ditembus hanya dalam 2 atau 3 jam saja.

Sesuai dengan wawancara dengan Ketua MPD Kabupaten Simeulue menjelaskan bahwa:<sup>53</sup>

*“pada saat ini masyarakat kabupaten simeulue sudah mudah menuju kota Sinabang, kalau dulu bisa memakan waktu 1 hari perjalanan sekarang hanya dengan 2 atau 3 jam saja. Ini tidak terlepas dari akses jalan yang semakin baik....”*

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bahwa akses jalan yang semakin baik telah mempengaruhi perjalanan masyarakat Kabupaten Simeulue menuju kota Sinabang. Dulu, perjalanan tersebut memakan waktu 1 hari, tetapi sekarang hanya membutuhkan 2 atau 3 jam saja. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan dalam infrastruktur jalan telah memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat, meningkatkan mobilitas, dan mempersingkat waktu perjalanan.

#### **4.4 Dampak Pemekaran Kabupaten Simeulue Dalam Bidang Sosial Ekonomi**

Kabupaten Simeulue terus berusaha untuk meningkatkan pembangunan dibidang sosial ekonomi. Selama tahun 2018-2022 laju pertumbuhan mengalami kenaikan secara fluktuatif, dimana laju pertumbuhan pada tahun 2018 sebesar 4,24 persen, tahun 2019 sebesar 4,60 persen kemudian melambat pada tahun 2020, dimana pada tahun tersebut terjadi pandemi yang melanda seluruh dunia dimana hal tersebut berdampak pada pertumbuhan ekonomi di seluruh negara termasuk Indonesia terkhususnya Kabupaten Simeulue. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak -4,48 persen dari tahun sebelumnya yakni menjadi 0,12

<sup>53</sup> Wawancara penulis dengan Sarman Jayadi, Ketua Majelis Pendidikan Daerah (MPD) tanggal 01 Maret 2023.

persen. Namun pada 2021 laju pertumbuhan ekonomi kembali meningkat menjadi 2,85 persen dan pada tahun 2022 meningkat kembali menjadi 3,62 persen. Pada tahun 2022 terjadi perbaikan ekonomi setelah masa pandemik.<sup>54</sup>

**Tabel Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Simeulue Tahun 2018-2022**

No	Tahun	Persentase (%)
1	2018	4,24
2	2019	4,60
3	2020	0,12
4.	2021	2,85
5.	2022	3,62

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simeulue dari tahun 2018 – 2022 mengalami kenaikan yang flukatif. Pada tahun 2018, laju pertumbuhan ekonomi mencapai 4,24 persen, kemudian meningkat menjadi 4,60 persen pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi akibat pandemi yang melanda seluruh dunia. Kabupaten Simeulue juga terdampak oleh pandemi ini, dengan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 turun sebesar -4,48 persen, yang berarti pertumbuhan ekonomi negatif. Namun, terdapat perbaikan pada tahun 2021, di mana laju pertumbuhan ekonomi kembali meningkat menjadi 2,85 persen. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan lebih lanjut dalam pertumbuhan ekonomi menjadi 3,62 persen. Hal ini menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi setelah masa pandemik. Data tersebut diatas memberikan gambaran bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simeulue dengan penurunan yang signifikan pada tahun 2020 dan terjadi pemulihan pada tahun 2021 dan 2022.

<sup>54</sup> Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Simeulue Menurut Pengeluaran 2018-2022: Tim Penyusun BPS Simeulue: Tahun 2022, hal 47-48.

Hal tersebut diatas sejalan dengan hasil wawancara dengan Staf Ahli Bupati Simeulue bidang Ekonomi dan Pembangunan beliau menjelaskan,

*“Sejak Kabupaten Simeulue pisah dengan meulaboh (baca: Aceh Barat), Ekonomi Kabupaten Simeulue berjalan dengan baik, walaupun aktifitas ekonominya belum bisa menyaingi, tetapi ekonomi masyarakat simeulue cukup baik dibanding beberapa kabupaten kota lainnya.”<sup>55</sup>*

Laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga lima tahun terakhir mengalami fluktuatif, dimana tahun 2018 komponen tumbuh sebesar 2,65 persen dan tahun 2022 melambat menjadi 2,10 persen. Komponen konsumsi LNPRT pada tahun 2022 adalah sebesar 4,62 persen dimana tahun 2022 komponen ini mengalami peningkatan sebesar 1,46 persen dari tahun 2021.

Laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2018, pertumbuhannya sebesar 2,65 persen, namun pada tahun 2022 melambat menjadi 2,10 persen. Fluktuasi ini menunjukkan adanya perubahan dalam pola konsumsi rumah tangga dari tahun ke tahun. Komponen konsumsi LNPRT pada tahun 2022 mencapai 4,62 persen. Terdapat peningkatan sebesar 1,46 persen dari tahun sebelumnya (2021). Hal ini menunjukkan adanya kenaikan signifikan dalam komponen konsumsi LNPRT pada tahun 2022. Namun, data mengenai komponen konsumsi LNPRT pada tahun-tahun sebelumnya tidak tersedia, sehingga sulit untuk mengetahui tren jangka panjang dari komponen ini.

Komponen konsumsi pemerintah pada tahun 2018 memiliki laju pertumbuhan sebesar 2,29 persen, pada tahun 2019 sebesar 2,58 persen dan menurun pada tahun 2020 yakni menjadi -9,71 persen. Pada tahun 2021 meningkat kembali menjadi 2,67 persen. Peningkatan ini terjadi akibat pandemi dimana pada tahun 2021 banyak anggaran yang dialihkan untuk penanganan pandemi. Namun pada tahun 2022 menurun kembali akibat meredanya pandemi.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan dari data yang diberikan:

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Sahirman (staf Ahli Bupati bidang ekonomi dan pembangunan) pada tanggal 08 Maret 2023

No	Tahun	Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah (%)
1	2018	2.29
2	2019	2.58
3	2020	-9.71
4	2021	2.67
5	2022	Menurun

Dalam data tersebut, dapat dilihat fluktuasi pertumbuhan konsumsi pemerintah selama periode waktu yang diberikan. Pada tahun 2018, pertumbuhan konsumsi pemerintah mencapai 2.29 persen. Kemudian Pada tahun 2019, pertumbuhan konsumsi pemerintah sedikit meningkat menjadi 2.58 persen. Namun pada tahun 2020, terjadi penurunan signifikan dalam pertumbuhan konsumsi pemerintah menjadi -9.71 persen. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan dampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan pergeseran anggaran untuk penanganan krisis kesehatan dan pemulihan ekonomi. Selanjutnya pada tahun 2021, pertumbuhan konsumsi pemerintah kembali meningkat menjadi 2.67 persen. Peningkatan ini dapat diatribusikan pada realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 dan upaya pemulihan ekonomi. Tidak ada data spesifik yang diberikan untuk pertumbuhan konsumsi pemerintah pada tahun 2022, namun dikatakan bahwa pertumbuhan ini kembali menurun akibat meredanya pandemi.

#### 4.5 Dampak pemekaran dalam Bidang Infrastruktur Pembangunan

Pemekaran daerah memiliki beberapa nilai lebih dalam bidang infrastruktur. Pemekaran daerah memungkinkan penyesuaian infrastruktur dengan kebutuhan lokal yang lebih spesifik. Dengan terbentuknya daerah baru, infrastruktur dapat dirancang dan dibangun sesuai dengan kebutuhan



masyarakat setempat, termasuk jaringan jalan, transportasi, air bersih, listrik, dan telekomunikasi. Infrastruktur yang berkualitas akan membawa dampak positif terhadap aksesibilitas, mobilitas, kesehatan, pendidikan, dan kesempatan ekonomi bagi masyarakat di daerah baru. Selain itu, dengan terbentuknya daerah baru, fokus pembangunan dapat lebih ditekankan pada pengembangan infrastruktur yang mendukung sektor-sektor ekonomi potensial di daerah tersebut, seperti pariwisata, pertanian, industri, atau jasa.

Pemekaran daerah dapat menjadi kesempatan untuk menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengembangan infrastruktur. Dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, infrastruktur yang dibangun di daerah baru dapat dirancang dan dikelola dengan prinsip keberlanjutan guna mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Wawancara peneliti dengan kepala Bappeda menjelaskan bahwa:<sup>56</sup>

*“Alhamdulillah setelah pemekaran, sekarang kita punya sekretariat daerah sendiri yang kita kelola. Total semuanya ada 45 organisasi dinas/badan/kantor. Simeulue pada saat ini juga telah memiliki 343 Sekolah mulai dari TK, SD, SMP dan SMA.”*

Keuntungan-keuntungan ini menunjukkan nilai lebih pemekaran dalam bidang infrastruktur, yang dapat mendorong pembangunan yang lebih baik dan merata di daerah-daerah yang terlibat.

Pemekaran Daerah dalam tujuan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Simeulue mempunyai nilai lebih sendiri. Nilai lebih ini dapat kita bandingkan dengan kondisi pembangunan infrastruktur pada saat masih dibawah Aceh Barat. Pada saat itu yang paling dirasakan adalah belum adanya jalan keliling Simeulue sehingga akses masyarakat ke pusat kota harus menggunakan transportasi laut seperti boat dan robin.<sup>57</sup>

*“pada saat Kabupaten Simeulue sebelum berdiri akses jalan sangat susah bahkan dari daerah Simeulue barat hanya bisa dikases menggunakan transportasi laut seperti bot kecil, jalan simeulue tembus.”*

<sup>56</sup> Wawancara dengan kepala Bappeda Simeulue pada tanggal 02 Maret 2023

<sup>57</sup> Wawancara dengan Mukri Mayadi, Kabag Pembangunan Kab. Simeulue.

Pembangunan jalan yang memudahkan akses masyarakat ke kota memiliki dampak yang luas dan positif. Hal ini meningkatkan mobilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat konektivitas sosial, memudahkan akses ke layanan dasar, dan meningkatkan keselamatan transportasi. Infrastruktur jalan yang baik merupakan investasi penting untuk perkembangan dan kemajuan suatu daerah.

Kabupaten Simeulue pada saat ini memiliki panjang jalan sepanjang 352,36 km. Kondisi jalan tersebut sudah bisa diakses dan dinikmati masyarakat dengan mudah sehingga akses ke pusat kota dalam kaitannya dengan aktifitas ekonomi semakin terjangkau.

#### **4.6 Aspek yang belum Tersentuh Pasca Pemekaran Daerah di Kabupaten Simeulue**

Pasca pemekaran daerah, masih ada beberapa aspek yang mungkin belum tersentuh atau belum sepenuhnya ditangani dengan baik. Pada penelitian ini berdasarkan wawancara dengan narasumber menjelaskan bahwa di Kabupaten Simeulue aspek yang belum terkelolah dengan baik pasca pemekaran daerah adalah sektor perikanan. Kabupaten Simeulue memiliki potensi perikanan yang cukup besar, mengingat lokasinya yang berada di dekat Samudra Hindia dan perairan yang kaya akan sumber daya laut

*“Aspek yang belum terkelolah dengan baik di Simeulue adalah sektor perikanan, bayangkan saja pulau kita yang dikelilingi lautan yang kaya akan hasil laut ini bisa kita ekspor keluar negeri-kan sangat potensial, akan tetapi ini belum mampu kita kelola sendiri.”*

Beberapa potensi perikanan di Simeulue antara lain seperti perikanan tangkap mengingat Perairan sekitar Simeulue merupakan daerah yang kaya akan hasil tangkapan ikan. Nelayan setempat dapat menangkap berbagai jenis ikan seperti tuna, ikan layang, cumi-cumi, udang, dan ikan-ikan demersal lainnya. Potensi perikanan tangkap ini menjadi mata pencaharian utama bagi masyarakat pesisir di pulau ini. Selain perikanan tangkap budidaya ikan air

laut seperti ikan kerapu, ikan kakap seperti yang telah dilakukan di beberapa kawasan pesisir. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi ikan secara berkelanjutan dan membantu perekonomian lokal.

Selanjutnya sektor perikanan yang potensial untuk dikelola adalah tambak udang. Budidaya udang juga memiliki potensi di Simeulue. Kabupaten Simeulue potensial cukup besar dengan kondisi lingkungan yang mendukung untuk budidaya udang. Budidaya udang lobster dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan bagi masyarakat setempat.

Kabupaten Simeulue juga potensial menjalankan destinasi wisata memancing. Destinasi ini dapat menarik wisatawan, baik lokal maupun internasional. Para wisatawan dapat menikmati keindahan laut dan menantang diri mereka dengan memancing di perairan sekitar Simeulue. Pemandangan yang indah dan kemungkinan menangkap ikan besar menjadi daya tarik utama untuk para pemancing.

Pemerintah setempat dan pihak terkait perlu memperhatikan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, melindungi ekosistem laut, dan menerapkan praktik-praktik budidaya yang ramah lingkungan. Selain itu, pengembangan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan perikanan, fasilitas pemrosesan ikan, dan akses pasar juga perlu diperhatikan untuk mendukung pertumbuhan sektor perikanan di Simeulue.

**Infrastruktur:** Pemekaran daerah sering kali berdampak pada peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan ekonomi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan pembangunan infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, saluran air, listrik, dan telekomunikasi, agar dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan wilayah baru secara optimal.

**Pelayanan Publik:** Pemekaran daerah berarti adanya kebutuhan baru akan pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kebersihan. Penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa layanan-layanan ini dapat tersedia dengan baik di wilayah-wilayah yang baru terbentuk

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan paparan data dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya mengenai Analisis Dampak Pemekaran Daerah di Kabupaten Simeulue dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dampak pemekaran Daerah Kabupaten Simeulue dapat di lihat dari segi pelayanan publik, dimana masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan akses dari pelayanan berupa pelayanan administrasi, pendidikan, dan juga kesehatan dimana sebelum pemekaran hanya harus dilakukan di kabupaten Aceh Barat.
2. Setelah menjadi daerah otonom, Kabupaten Simeulue telah berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dapat kita lihat telah tersedianya layanan yang berkaitan dengan administrasi, pendidikan dan kesehatan walaupun masih belum bisa menyaingi kabupaten induknya yaitu Aceh Barat.
3. Dari bidang sosial ekonomi ekonomi, Kabupaten Simeulue masih tergolong lamban, terlihat dari lima tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi yang fluaktif walaupun pada tahun 2022 kembali mulai membaik.
4. Infrastruktur yang belum dikelolah dengan baik di Kabupaten Simeulue adalah sektor perikanan.

#### **5.2 Saran**

Dari kesimpulan di atas ada beberapa saran yang bisa dijadikan masukan pelaksanaan pemekaran daerah kedepannya:

1. Kepada pemerintah kabupaten Simeulue agar kiranya meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat agar terciptanya pelayanan yang prima yang mudah, murah, dan cepat kepada masyarakat.

2. Kabupaten Simeulue dengan serius harus memajukan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan terlebih lagi di sektor perikanan yang belum dikelola dengan baik. Kabupaten dapat bekerjasama dengan instansi terkait seperti kementerian kelautan RI dalam memajukan sektor potensial dibidang perikanan tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Azyumardi Azra. *Demokrasi hak asasi manusia & Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media. 2000.
- A. Ubaedillah. Dkk. *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Indonesia Center For Civic Education. 2000.
- Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif Komunitas Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana. 2001.
- Eko Oktah Supri Lariky. *Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Bangkinang Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau Pekanbaru. 2012.
- Ermaya Suradinata. *pelaksanaan otonomi daerah dalam kerangka untuk meningkatkan interrasi bangsa*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional, Departemen Pertahanan. 2000. Marnis, *Pengantar Bisnis*. Pekanbaru : UNRIPress. 2007.
- Etta Mamang Sengaji Sopiah. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi. 2010.
- HAW. Widjaja. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2002.
- Husaini Usman Pumono Setiady Akbar. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. 2004.

### 2. Jurnal

- Imam suparyoga. Tabarno. *Metode Penelitian Sosial-Agama*. Bandung:Remaja Rosdarya. 2003.
- Ny. Arie Sukanti Hutagalung. Markus Gunawan. *Kewanangan Pemerintahan Di Bidang Pertahanan*. Jakarta: Raja Grafindo. 2008.

- Komaruddin Hidayat dan Azyumardi Azra. *Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Prenada Media Group. 2008.
- Meilia Lovita. *Dampak Pemekaran Kabupaten Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Lampung Barat*. Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Saeful Anwar. *Pemekaran Wilayah Bine Selatan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar. 2014.
- Siswanto Sunamo. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. 2009.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)*. Jakarta: Raneka Cipta. 2010.
- Soehartono Irawan. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2008.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Yusnani Hasyimzoem. Dkk. *Hukum Daerah*. Malang CV. Cita Intrans Selaras Wisma Kalimetro. 2016.
- Winarna Surya Adisubrata. *Otonomi Daerah Di Era Reformasi*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP). 1999.

### 3. Internet

- <https://simeuluekab.go.id/halaman/tentang-simeulue> diakses pada tanggal 9 Februari 2023 jam 22.00 WIB.
- Moehammad Riswan Roesli, *Simeulue Dari Masa Ke Masa*, hal-13.

### Identitas Peneliti

Nama : Aulia Rahmad  
 Nim : 160801039  
 Jenis Kelamin : Laki laki  
 Pendidikan Trakhir : SMA N 4 SIMEULUE BARAT  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Alamat : Desa Sembilan, Kec.Simeulue Barat, Kab. Simeulue

### INSTRUMEN PENELITIAN

Judul skripsi “Analisis Dampak Pemekaran Daerah Di Kabupaten Simeulue”. Adapun pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pertanyaan yang ditujukan kepada Anggota DPRK Simeulue
  1. Apakah dampak dari pemekaran kabupaten simeulue terhadap kemajuan sosial dan ekonomi?
  2. Bagaimana analisis pemberdayaan daerah setelah adanya pemekaran kabupaten simeulue?
  3. Bagaimana dampak pemekaran kabupaten simeulue terhadap pelayanan public di jajaran pemerintah kabupaten simeulue?
  4. Bagaimana sejarah berdirinya kabupaten simeulue?
  5. Bagaimana perkembangan yang dicapai oleh kabupaten simeulue?
  6. Apa visi dan misi kabupaten simeulue?
  7. Bagaimana kondisi masyarakat di kabupaten simeulue dalam hal kesejahtraan/dan kemajuan ekonomi?
  8. Bagaimana capaian kedepannya pemerintah kabupaten simeulue dalam hal mengembangkan dan memajukan daerah?



2. Pertanyaan yang diajukan untuk pejabat kantor bupati kabupaten simeulue
  1. Bagaimana sejarah berdirinya kabupaten simeulue?
  2. Bagaimana perkembangan yang dicapai oleh kabupaten simeulue?
  3. Apa visi dan misi kabupaten simeulue?
  4. Bagaimana keadaan struktur organisasi di sekretariat kabupaten simeulue?
  5. Bagaimana keadaan pekerja/karyawan di sekretariat daerah kabupaten simeulue?
  6. Bagaimana kondisi masyarakat di kabupaten simeulue dalam hal kesejahteraan/dan kemajuan ekonomi?
  7. Apakah dampak dari pemekaran kabupaten simeulue terhadap kemajuan sosial dan ekonomi?
  8. Bagaimana analisis pemberdayaan daerah setelah adanya pemekaran kabupaten simeulue?
  9. Bagaimana capaian kedepannya pemerintah kabupaten simeulue dalam hal mengembangkan dan memajukan daerah?
  10. Bagaimana dampak pemekaran kabupaten simeulue terhadap pelayanan public di jajaran pemerintah kabupaten simeulue?
  
3. Pertanyaan yang diajukan untuk tokoh masyarakat kabupaten simeulue.
  1. Bagaimana sejarah berdirinya kabupaten simeulue?
  2. Apakah dampak yang terjadi di kabupaten simeulue setelah terjadi pemekaran?
  3. Bagaimana kondisi masyarakat kabupaten simeulue setelah pemekaraan daerah?
  4. Apakah yang masyarakat rasakan setelah adanya pemekaran daerah?
  5. Apakah harapan untuk kabupaten simeulue kedepannya?

**PROFIL INFORMAN**

NO	Nama	Profesi	Alamat
1	Ihya Ulumuddin, Sp, MH	Anggota DPRK Simeukue	Sinabang
2	Ugek Ferlian	Anggota DPRK Simeulue	Sinabang
3	Sahriman	Staf Ahli bupati bidang ekonomi dan pembangunan	Sinabang
4	Mukhri Mayadi	Kabag pembangunan Kabupaten Simeulue	Sinabang
5	Sarman Jayadi	Ketua Majelis Pendidikan Daerah	Sinabang
6	Husin Alim, S E	Ketua DPMD kabupaten Simeulue	Sinabang
7	Fatwa Gunawan, S.Sos	Kassubag Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Setdakab Simeulue	Sinabang

**DOKUMENTASI PENELITIAN**



**Ihiya Ulumddin, Sp. MH (Anggota DPRK Simeulue)**



**Ugek Ferlian ( Anggota DPRK Simeulue )**



**(Ketua DPMD Kabupaten Simeulue)**



**Sarman Jayadi ( Ketua Majelis Pendidikan Daerah)**



**Mukhri Mayadi ( Kabag Pembangunan Kabupaten Simeulue)**



**Fatwa Gunawan, S.Sos. Kassubag Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Setdakab Simeulue**